

**PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBIJAKAN
DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA DANA
OTSUS DI INDONESIA**

(STUDI KASUS: PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ACEH)

SKRIPSI

*Diajukan guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



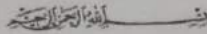
Oleh

Nama : Ade Shandra Pratiwi
NPM : 1705180030
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI
Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, 13 September 2021 , pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA : ADE SHANDRA PRATIWI
N P M : 1705180030
JURUSAN : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBLIAKAN
DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA
DANA OTSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS PROVINSI
PAPUA, PAPUA BARAT DAN ACEH)

DINYATAKAN : (A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si)

Penguji II

(SRI ENDANG RAHAYU, SE., M.Si)

Pembimbing

(Dra. LAILAN SAPINA HASIBUAN, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(Asoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ADE SHANDRA PRATIWI

N.P.M : 1705180030

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBIJAKAN
DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA
DANA OTSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS PROVINSI
PAPUA, PAPUA BARAT DAN ACEH)

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, September 2021

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HASIBUAN, M.Si

Diketahui/Disetujui

Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan.

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



H. JANURI, SE., MM., M.Si

ABSTRAK

ADE SHANDRA PRATIWI. NPM 1705180030. PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA DANA OTSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS: PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ACEH).

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat judul “**PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA DANA OTSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS: PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ACEH)**”. Topik ini diangkat berdasarkan fenomena kemiskinan yang terjadi di Provinsi penerima dana otonomi khusus (Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh), yang dimana ketiga Provinsi ini menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi. Dengan diberlakukannya kebijakan otonomi khusus dan diberikan dana tambahan otonomi khusus, namun ketiga provinsi ini belum mampu membebaskan diri dari kemiskinan yang melanda. Tujuan utama penelitian ini ialah untuk melakukan estimasi dan membuktikan bagaimana variabel-variabel TKD, DOK, dan DD dalam mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data panel, dimana data yang dihimpun adalah data cross section adalah tiga provinsi yang menerima dana otonomi khusus di Indonesia (Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh) sedangkan data time series yang digunakan dalam penelitian ini ialah dihimpun sebanyak 4 tahun, yaitu mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Berdasarkan hasil estimasi dengan metode regresi berganda menggunakan software E-Views 10, diukur goodness of fit (R^2) pada model pertama diperoleh nilai sebesar 0,501811 atau 50,18%. Secara parsial, variabel independen yaitu TKD berpengaruh negatif dan tidak signifikan dan DD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan, sedangkan DOK berpengaruh positif dan signifikan.

Kata Kunci: Tingkat Kemiskinan, Transfer ke Daerah (TKD), Dana Otonomi Khusus (DOK), Dana Desa (DD).

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan kesungguhan hati penulis mengucapkan rasa syukur yang tidak ada hentinya kepada sang Khalik, sang Maha Pencipta yang telah memberikan nikmat yang luar biasa bagi penulis. Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, kesempatan dan hidayah-Nya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan yang berupa proposal penelitian dengan judul **“Perkembangan Kemiskinan Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Provinsi Penerima Dana Otsus di Indonesia (studi kasus: Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh)”** dengan sebaik mungkin.

Shalawat berangkaikan salam tidak lupa penulis hadiahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW yang telah membawa kita para umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu, penuh dengan amal dan penuh dengan iman sampai saat sekarang ini. Penulis menyadari bahwa isi yang terkandung dalam proposal ini belum sempurna karena kurangnya kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki dalam merangkai kata-kata menjadi suatu karya tulis yang baik. Oleh karena itu dengan hati yang tulus dan ikhlas penulis menerima kritik untuk menyempurnakan mini riset ini. Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **ALLAH SWT**, yang telah memberikan Rahmat serta Rezeki-Nya yang luar biasa serta nikmat iman dan nikmat kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-

Nya Yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

2. Kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Wan Irwansyah dan ibunda Habibah Harahap yang telah memberikan kasih sayang, yang telah membesarkan, mendidik, memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis semenjak kecil. Terima kasih atas motivasi, curahan kasih sayang, dukungan, pengorbanan materil, dan do'a nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dan kelak bisa menjadi orang yang sukses.
3. Untuk adik-adik saya yang tercinta, Aldhi Prayoga, Ade Tia Mayma, dan Ade Mikayla Sari. Dan seluruh keluarga besar yang selama ini selalu memberikan penulis semangat yang tiada hentinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga selaku dosen yang sudah membantu dan juga memberikan bimbingan/arahan/kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
7. Ibu Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakulttas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

8. Ibu Lailan Safina Hasibuan, M.Si selaku dosen pembimbing saya yang telah membantu dan juga memberikan bimbingan/arahan/kritikan kepada penulis sehingga terwujudnya skripsi ini.
9. Seluruh dosen-dosen yang telah mengajarkan penulis dari semester satu hingga akhir terkhusus dosen-dosen Prodi Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama ini, serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Untuk sahabat-sahabat saya Issyafira Aldis Sakinanda yang selalu berbagi cerita dan juga telah banyak membantu dan selalu memberikan nasehat, saran, serta dukungan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Seluruh teman-teman seperjuangan Ekonomi Pembangunan 2017 yang tidak saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada xiumin, lay, suho, baekhyun, chen, chanyeol, d.o, kai, sehun dan 23 bujang NCT yang tidak saya sebutkan namanya satu per satu karena telah menghibur penulis dalam pengerjaan skripsi ini.
13. Kepada diriku sendiri, terima kasih karena sudah bisa bertahan sampai sejauh ini. Kamu hebat.

Penulis mengharapkan semoga Skripsi Penelitian ini memberikan manfaat dan berguna bagi pembaca secara umum dan menjadi pembelajaran bagi peneliti yang akan meneliti pada pembahasan tersebut serta terkhusus bermanfaat bagi penulis. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan dan apabila dalam penulisan Akhir kata penulis haturkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, September 2021

Penulis

Ade Shandra Pratiwi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	31
1.3 Batasan Masalah.....	32
1.4 Rumusan Masalah	32
1.5 Tujuan Penelitian	32
1.6 Manfaat Penelitian	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	34
2.1 Landasan Teori.....	34
2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi.....	34
2.1.2 Teori Pengeluaran Negara.....	52
2.1.3 Teori Kemiskinan.....	56
2.2 Regulasi Pemerintah.....	58
2.2.1 Otonomi Daerah.....	58
2.2.2 Desentralisasi Fiskal.....	60
2.3 Penelitian Terdahulu	63
2.4 Kerangka Konseptual	65
2.4.1 Kerangka Model Estimasi	65
2.5 Hipotesis Penelitian.....	66

BAB III METODOLOGI PENELITIAN	67
3.1 Pendekatan Penelitian	67
3.2 Definisi Operasional.....	67
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	68
3.4 Jenis dan Sumber Data	69
3.4.1 Jenis Data	69
3.4.2 Sumber Data	69
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	69
3.6 Model Estimasi	70
3.7 Metode Estimasi.....	70
3.8 Teknik Analisis Data.....	71
3.8.1 Analisis Deskriptif	71
3.8.2 Metode Regresi Linier Berganda.....	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian	79
4.1.1 Provinsi Papua.....	79
4.1.2 Provinsi Papua Barat	88
4.1.3 Provinsi Aceh.....	96
4.2 Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus di Tiga Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus	104
4.2.1 Analisis Penerimaan Dana Otonomi Khusus	104
4.2.2 Kontribusi dan Pertumbuhan Dana Otonomi Khusus..	107
4.3 Analisa Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh	109

4.4 Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Tiga Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus.....	116
4.4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Tiga Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus	116
4.4.2 Perkembangan Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Tiga Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus.....	118
4.5 Hasil Analisis Regresi	122
4.5.1 Penaksiran	123
4.5.2 Interpretasi Hasil	124
4.5.3 Konstanta Dan Intersep	125
4.5.4 Uji Statistik	127
4.5.5 Uji Asumsi Klasik	128
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	132
5.1 Kesimpulan	132
5.2 Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2016-2020 (persen).....	16
Tabel 1.2	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh).....	18
Tabel 1.3	Garis Kemiskinan di Indonesia tahun 2016-2020.....	21
Tabel 1.4	Garis Kemiskinan di Provinsi Papua tahun 2016-2020	22
Tabel 1.5	Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat tahun 2016-2020.....	23
Tabel 1.6	Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh tahun 2016-2020.....	25
Tabel 1.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Tahun 2016 –2020.....	27
Tabel 1.8	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Barat Tahun 2016–2020.....	29
Tabel 1.9	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Aceh Tahun 2016 –2020	30
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	63
Tabel 3.1	Defenisi Operasional.....	68
Tabel 4.1	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kab/Kota di Provinsi Papua	83
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	85
Tabel 4.3	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kab/Kota di Provinsi Papua Barat	92

Tabel 4.4	Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	94
Tabel 4.5	Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kab/Kota di Provinsi Aceh.....	99
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020.....	101
Tabel 4.7	Penerima Dana Otonomi Khusus (triliun rupiah) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh).....	105
Tabel 4.8	Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh.....	109
Tabel 4.9	Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh	116
Tabel 4.10	Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh (triliun rupiah).....	118
Tabel 4.11	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh (triliun rupiah)	119
Tabel 4.12	Dana Desa Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh (milyar rupiah)	121
Tabel 4.13	Hasil Regresi Berganda	122
Tabel 4.14	Uji Haussman.....	130

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	5
Grafik 1.2	Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016-2020 (persen).....	15
Grafik 4.1	TPAK Provinsi Papua Agustus 2017-Agustus 2019.....	87
Grafik 4.2	TPAK Provinsi Papua Barat Agustus 2017-Agustus 2019.....	95
Grafik 4.3	TPAK Provinsi Aceh Agustus 2017-Agustus 2019.....	103
Grafik 4.4	Kontribusi Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh.....	107
Grafik 4.5	Pertumbuhan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah	56
Gambar 2.2 Kerangka Analisis Penelitian	65
Gambar 2.3 Kerangka Model Estimasi	65
Gambar 3.1 Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis (uji-t)	73
Gambar 3.2 Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis (uji-f)	74
Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Papua	79
Gambar 4.2 Peta Wilayah Provinsi Papua Barat.....	89
Gambar 4.3 Peta Wilayah Provinsi Aceh	96
Gambar 4.4 Scatterplot Model	129

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemberian otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam rangka mengelola pembangunan di daerahnya, kreativitas, inovasi dan kemandirian diharapkan akan dimiliki oleh setiap daerah, sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungannya pada Pemerintah Pusat. Otonomi daerah adalah hak dan wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat daerah tersebut. Dan yang lebih penting adalah bahwa dengan adanya otonomi daerah, kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakatnya akan meningkat, baik pelayanan yang sifatnya langsung diberikan kepada masyarakat maupun pelayanan yang tidak langsung diberikan, seperti pembuatan fasilitas - fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya.

Dengan otonomi daerah, daerah dituntut untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan masih adanya bantuan dan bagian (sharing) dari Pemerintah Pusat dan menggunakan dana publik sesuai dengan prioritas dan aspirasi masyarakat. Adanya otonomi daerah maka terjadi desentralisasi yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi termasuk menyusun program-program pembangunan daerah dan perencanaan lainnya yang dilimpahkan dari pusat ke daerah (Kharisma, 2013). Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah adanya pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

(bidang moneter dan fiskal nasional yang didesentralisasikan kepada daerah) (Hadi & Saragih, 2013).

Desentralisasi dalam konteks harfiah adalah lawan dari kata sentralisasi yang berarti pemusatan kekuasaan. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Kumorotomo, 2008). Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme transfer dana dari APBN dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan (fiscal sustainability) dan memberikan stimulus terhadap aktivitas perekonomian masyarakat, maka dengan kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom (Sun'an dan Senuk 2017).

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia sebagai sebuah konsekuensi politik saat ini sudah berada pada kondisi point no return, sehingga aspek-aspek yang dikedepankan lebih bersifat penguatan kapasitas serta quality improvement..Desentralisasi fiskal pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan potensi daerah, dalam hal ini adalah dari segi fiskal. Undang-Undang Dasar Negara a Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi ke dalam provinsi- provinsi kemudian dibagi lagi ke dalam wilayah Kabupaten dan Kota. Setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan melaksanakan sendiri

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah yang bersangkutan.

Di Indonesia, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah mulai hangat dibicarakan sejak bergulirnya era reformasi pasca runtuhnya tembok kekuasaan pemerintahan orde baru. Sistem pemerintahan sentralistis yang selama ini dianut pemerintahan presiden Soeharto dianggap tidak mampu membawa kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat luas sehingga memunculkan tuntutan kewenangan yang lebih besar dari daerah untuk melaksanakan pembangunan. Tuntutan ini kemudian melahirkan undang-undang otonomi daerah, yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia.

Desentralisasi fiskal sejauh ini sudah memberikan dampak positif terhadap otonomi daerah di Indonesia namun belum diatur secara khusus dalam undang-undang. Instrumen-instrumen hukum yang ada dalam mengatur desentralisasi fiskal kini berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membangun kegiatan perekonomian daerah dan menjadi landasan dalam membuat peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi fiskal di masa yang akan datang. Kebijakan desentralisasi fiskal memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah agar dapat memanfaatkan potensi ekonomi daerahnya sendiri untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Pemerintah Daerah dapat merumuskan peraturan daerah mengenai desentralisasi fiskal di daerahnya berdasarkan hal-hal tersebut agar pengambilan keputusan lebih didengarkan oleh masyarakat karena sesuai dengan karakter dan potensi daerah.

Dengan demikian, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah kedepannya diharapkan mampu membawa Indonesia menuju kemakmuran yang inklusif dan berkelanjutan. Segala upaya dan kerja pemerintah tersebut tentu wajib mendapatkan dukungan sepenuhnya dari segala pihak yang terkait dan berkepentingan dalam mendukung suksesnya pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi di Indonesia seutuhnya. Tanpa dukungan seluruh pihak, niscaya pemerintah sendiri tidak akan mampu melaksanakan secara optimum.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dituliskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi daerah, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk dan luas daerah. Undang-Undang ini juga mengatur bahwa keleluasaan yang diberikan kepada daerah harus proporsional yang diwujudkan dengan pemanfaatan sumber daya di daerah secara berkeadilan dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan spirit konstitusi dan bertujuan meningkatkan kemandirian daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 kemudian masing-masing disempurnakan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang 33 Tahun 2004, dituliskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri.

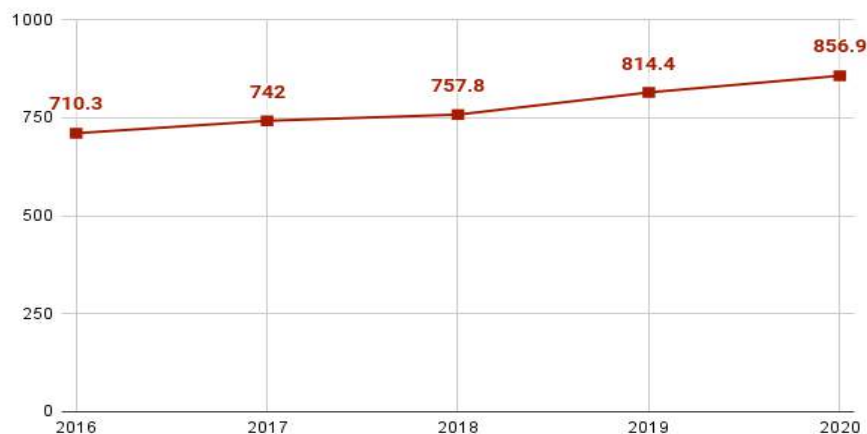
Pada tahun 2018 desentralisasi fiskal di Indonesia dilaksanakan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). TKDD merupakan salah satu komponen belanja negara yang mempunyai peranan sangat penting sebagai

instrumen kebijakan fiskal dalam memperkuat implementasi desentralisasi fiskal untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (public service delivery) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare). Dalam struktur Belanja Negara pada APBN, TKDD terdiri dari dua bagian besar, yaitu Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan untuk daerah provinsi, kabupaten dan kota, dan Dana Desa yang diberikan kepada desa.

Dalam APBN 2020 transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) dialokasikan sebesar Rp 856,9 triliun yang terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp 784,9 triliun dan Dana Desa sebesar Rp 72 triliun. Perkembangan transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) selama 5 tahun terakhir (2016 – 2020) terlihat sebagai berikut (angka dalam triliun).

Grafik 1.1

Perkembangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (2016- 2020)



Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI (data diolah)

Adapun rata-rata kenaikan TKDD selama 5 tahun naik sebesar 4,6 persen.

Kebijakan dalam pengalokasian TKDD dapat terlihat sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil pada dasarnya terbagi dalam 2 bagian yaitu bagi hasil pajak (*tax sharing*) dan bagi hasil sumber daya alam (*natural resources sharing*). Kebijakan yang terkandung dalam APBN 2020 sebesar Rp 117,6 triliun yakni:

- Menggunakan minimal 50% DBH CHT untuk mendukung program JKN.
- Memperkuat implementasi penggunaan 25% Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.
- Pengendalian alokasi DBH dengan mempertimbangkan realisasi DBH tiga tahun terakhir.
- Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara dengan mempertimbangkan kondisi keuangan negara.

2. Dana Alokasi Fisik

Dana Alokasi Fisik sebesar Rp 72,2 triliun dialokasikan atas dasar kebijakan sebagai berikut:

- Diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan infrastruktur layanan publik.
- Memperkuat kebijakan afirmasi.
- Melakukan restrukturisasi bidang DAK fisik dengan mengalihkan beberapa bidang jenis regular ke jenis penugasan.
- Penambahan bidang sosial dan transportasi laut.
- Melanjutkan peningkatan kualitas pelaksanaan kegiatan melalui penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

3. Dana Alokasi Non Fisik

Dianggarkan sebesar Rp 130,3 triliun diarahkan untuk:

- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.
- Meningkatkan kualitas pengalokasian dan penyaluran.
- Menyempurnakan unit cost BOS (naik) dan memutakhirkan data sasaran penerima.

4. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum sebesar Rp 427,1 triliun didasarkan kebijakan:

- DAU bersifat final untuk memberi kepastian pendanaan bagi daerah.
- Kebijakan dukungan pendanaan kelurahan, Siltap kepala Desa dan Perangkat Desa, dan gaji pegawai.
- Menyempurnakan formasi DAU untuk pemerataan kemampuan fiskal antar daerah.
- Memperkuat implementasi penggunaan 25% Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.

5. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY

Dana sebesar Rp 22,7 triliun diarahkan untuk:

- Memperbaiki tata kelola Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, kemudian Dana Tambahan Infrastruktur untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dengan memperkuat peran APIP dalam mengawasi dan memberikan rekomendasi penyaluran.

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Keistimewaan DIY.

6. Dana Intensif Daerah (DID)

Dana Intensif Daerah sebesar Rp15 triliun dimanfaatkan untuk:

- Memperkuat DID sebagai instrument intensif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.
- Penguatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan DID di daerah.

Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 72 triliun digunakan untuk:

1. Penyesuaian bobot Alokasi Dasar (AD) dan Alokasi Formula (AF) dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan.
2. Pemberian Alokasi Afirmasi (AA) kepada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi.
3. Pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa-desa dengan kinerja terbaik.
4. Meningkatkan porsi penggunaan Dana Desa terutama untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa.

Dana Otonomi Khusus di berikan di beberapa daerah pasca reformasi, seperti Provinsi Aceh dan Provinsi Papua. Kemudian Provinsi Papua dipecah menjadi Provinsi Papua Barat. Jadi, ada tiga daerah yang mendapatkan dana Otonomi Khusus. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah ‘tertentu’ untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di

daerah tersebut. Kewenangan ini diberikan agar daerah tertentu dapat menata daerah dan bagian dari daerah tersebut agar lebih baik lagi di bidang tertentu sesuai dengan aspirasi daerahnya. Dana Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh hanya diberikan pemerintah selama 20 tahun. Otonomi Khusus ini telah berjalan selama belasan tahun dan segera berakhir pada tahun 2022 untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dan 2028 untuk Provinsi Aceh.

Otonomi khusus ditawarkan melebihi otonomi daerah biasa, karena otonomi ini diberikan kepada daerah tertentu, yang dimana beberapa dari daerah tersebut mempunyai kelompok gerakan kemerdekaan yang ingin memisahkan dirinya (daerahnya) dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Adanya ketimpangan ekonomi antar wilayah yang menyebabkan kecemburuan dari berbagai wilayah karna ketidakadilan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, apalagi terhadap wilayah timur dan barat Indonesia yang merasa seperti di anak tirikan atau tidak di perdulikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah timur dan barat baik itu segi ekonomi, sosial, dan hukum. Masyarakat wilayah timur dan barat merasakan adanya ketidak merataan pembangunan di wilayah mereka dan mereka menganggap pemerintah hanya memperdulikan daerah pembangunan di pusat pemerintahan. Sedangkan di wilayah perbatasan di biarkan begitu saja tidak ada campur tangan pemerintah terhadap kemajuan dan perkembangan dari wilayah perbatasan itu sendiri. Dalam hal ini banyak ditemukan perdebatan dari daerah yang merasa tidak di perdulikan oleh pemerintah, sedangkan kekayaan bumi air di kuasai oleh pemerintah dan untungnya untuk pemerintah pusat tidak untuk daerah yang bersangkutan, sedangkan hasil dari kekayaan dari wilayah timur dan barat banyak di ambil oleh

pemerintah pusat dan menjadi penyumbang kekayaan bagi Indonesia dalam jumlah yang di bilang sangat besar dan tidak sebanding dengan pembangunan yang didapatkan dari pemerintah pusat.

Ketimpangan ekonomi yang berujung pada konflik disintegrasi terjadi di beberapa daerah di Indonesia, seperti pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adanya kewenangan yang besar dengan berlakunya UU Otonomi Khusus, diharapkan mampu menjadi solusi sebagai bentuk pendekatan damai agar kelompok gerakan tersebut tidak terus bergejolak.

Sejarah mencatat bahwa secara sosial politik, lahirnya UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua disebabkan oleh desakan rakyat Papua dengan tuntutan Papua Merdeka mulai 1998 – 2000. Aspirasi ini muncul dikarenakan 3 penyebab utama yakni 1). Persolan sejarah integrasi politik Papua, 2). Telah terjadinya berbagai kekerasan Negara dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua dan 3). Kegagalan pembangunan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrastruktur. Masyarakat Papua menyampaikan tuntutan merdeka tersebut melalui aksi damai kemudian memuncak pada tahun 1999 dengan tatap muka 100 orang wakil Papua dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Negara untuk menyampaikan Papua ingin keluar dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Provinsi Papua merupakan provinsi di wilayah timur Indonesia yang menghadapi berbagai persoalan mendasar terkait dengan fakta ketertinggalan wilayah. Daerah yang sebenarnya sangat kaya dengan potensi sumberdaya alam

(SDA) ternyata pada tataran riil menghadapi fakta yang bertolak belakang. Persoalan umum berupa ketertinggalan perekonomian masyarakat, minimnya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, jaringan infrastruktur yang masih memprihatinkan, hingga persoalan rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) merupakan permasalahan mendasar di wilayah ini. Dalam kerangka penerapan kebijakan Otonomi Khusus tersebut, ternyata tidak berkorelasi dengan perbaikan kesejahteraan masyarakat Papua. Bahkan terdapat indikasi bahwa aliran dana Otsus tersebut lebih banyak memperkaya pundi – pundi para elite penguasa lokal di Papua. Bahkan hingga saat ini masih banyak dijumpai fakta bahwa kehidupan sosial ekonomi masyarakat Papua masih sangat memprihatinkan.

Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua Barat mulai diberikan pada tahun 2008 melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008. Tujuan dari pemberian Dana Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Barat yaitu dalam rangka peningkatan pelayanan, akselerasi pembangunan, dan pemberdayaan seluruh rakyat di Provinsi Papua Barat agar dapat setara dengan daerah lain. Adapun pemanfaatan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Papua Barat ditujukan untuk pembiayaan kesehatan dan pendidikan.

Selain Provinsi Papua yang terkait permasalahan pemberontakan yang berdampak global di Indonesia, Provinsi Aceh juga mendapatkan sorotan dunia Internasional karena konflik GAM yang terjadi di Aceh selama kurun waktu 30 tahun merupakan salah satu konflik berdarah yang berlangsung dalam interval waktu yang relatif lama. Antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan kebijakan otonomi khusus. Terkait dengan permasalahan desentralisasi di Aceh, pemerintah telah merespon dengan memberlakukan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dengan alokasi dana otonomi khusus. Dana Otonomi Khusus merupakan salah satu pendapatan Aceh yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan. Infrastruktur yang dimaksudkan di antaranya berupa infrastruktur transportasi seperti jalan dan jembatan, infrastruktur pendukung bagi kegiatan ekonomi di sektor pertanian seperti waduk dan irigasi misalnya dan belanja barang modal yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah (Amri, 2017). Semakin baik infrastruktur tersebut semakin lancar kegiatan ekonomi masyarakat yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan mereka. Dengan dikeluarkannya UU pemerintahan Aceh dan jumlah dana otsus yang sudah diterima merupakan jumlah yang sangat besar untuk bisa dimanfaatkan untuk pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Aceh.

Penggunaan Dana Otsus tahun 2017 cukup dominan untuk bidang infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan dibandingkan dengan jenis penggunaan lainnya. Di bidang pendidikan, digunakan antara lain untuk pembangunan ruang kelas, pengadaan buku, asrama siswa, pengembangan pusat IT, dan pengadaan laboratorium mobile. Sementara itu, di bidang kesehatan digunakan antara lain untuk pengadaan obat-obatan, peralatan laboratorium, perbaikan gizi masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan penyakit menular. Sedangkan untuk Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) antara lain digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan, serta peningkatan kualitas jalan.

Total Dana Otsus yang telah diterima oleh Papua dan Papua Barat dari tahun 2002 hingga tahun 2020 sebesar Rp 94,2 triliun dengan Dana Tambahan Infrastruktur sebanyak Rp 31,4 triliun. Sedangkan total Dana Otsus yang telah diterima di Provinsi Aceh dari tahun 2008 sampai 2020 sebanyak Rp 81,47 triliun. Namun dengan dana sebesar sebesar ini, ketiga daerah yang menerima Dana Otsus masih terperangkap dalam jurang kemiskinan.

Di sisi lain, meningkatnya intensitas konflik fisik dan bersenjata maupun tuntutan kemerdekaan yang semakin tinggi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Aceh (NAD), dan Papua, maka kondisi demikian membuat pemerintah mau tidak mau harus secara serius mengeluarkan kebijakan yang secara khusus dimaksudkan untuk mengatasi persoalan tersebut sebagai sebuah bentuk kompromi politik. Kebijakan otonomi khusus yang berlaku di Aceh dan juga Papua adalah wujud dari respon pemerintah pusat dalam memperhatikan perkembangan aspirasi masyarakat, khususnya yang ada di Papua dan juga Aceh (NAD). Pemandangan yang kontradiktif telah menciptakan kesenjangan yang semakin kronis, sehingga perlu upaya terobosan untuk mengatasinya, antara lain dengan pemberian otonomi khusus tersebut. Bukan kebetulan jika kedua daerah ini mendapatkan status istimewa dalam sistem pemerintahan di Indonesia karena diperlakukan secara khusus karena memang ada sejumlah tujuan khusus yang hendak diraih. Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus oleh pemerintah tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, tetapi juga berorientasi pada penurunan tingkat kemiskinan.

Kemiskinan telah menjadi isu global yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemajuan peradaban umat manusia, bahkan Badan Pusat Statistik (BPS)

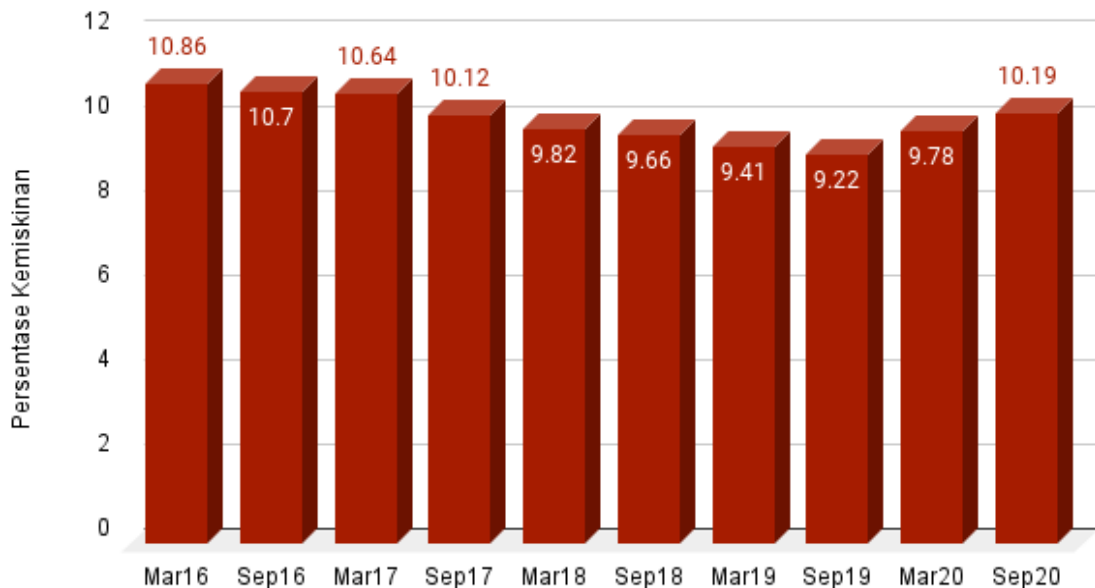
mencatat hingga bulan September 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia menembus angka 10,19 persen, meningkat 0,41 persen terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen terhadap September 2019. Menurut pakar kemiskinan, faktor ekonomi sering kali disebut sebagai penyebab utama munculnya kemiskinan. Namun pada kenyataannya, faktor politik adalah faktor yang paling dominan memainkan peranan bagi munculnya penduduk miskin baru akibat berbagai kebijakan yang dibuat. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor infrastruktur yang terbatas menjadi penyebab makin banyaknya kemiskinan di Indonesia. Meskipun memiliki sumber daya alam yang berlimpah namun apabila hidup di daerah yang tertinggal dengan infrastruktur yang terbatas maka besar kemungkinan individu tersebut akan tetap terjebak dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan juga telah membatasi hak rakyat untuk (1) Memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) Hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (4) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) Hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) Hak rakyat untuk berinovasi; (10) Hak rakyat untuk menjalankan spiritual dengan Tuhannya; dan (11) Hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik (Sahdan, 2005). Kemiskinan di Indonesia merupakan salah satu penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak

dikurangi. Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu.

Grafik 1.2

Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Tahun 2016 – 2020
(persen)



Sumber: www.bps.go.id

Angka kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi. Bahkan angka kemiskinan di tahun 2020 menjadi angka tertinggi dalam sejarah di Indonesia. Dari data Publikasi Statistik yang dirilis BPS (Badan Pusat Statistik). Dapat dilihat dari tahun 2016, persentase penduduk miskin setiap tahunnya menurun. Namun pada tahun 2020 Indonesia mengalami kenaikan persentase penduduk miskin di tiap provinsi. Penyebabnya adalah karena adanya pandemi *Covid-19*. Peningkatan persentase penduduk miskin disebabkan oleh kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran *virus Covid-19*. Selain

itu juga terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Indonesia Menurut Provinsi
Tahun 2016 - 2020

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
ACEH	16,43	15,92	15,68	15,01	15,43
SUMATERA UTARA	10,27	9,28	8,94	8,63	9,14
SUMATERA BARAT	7,14	6,75	6,55	6,29	6,56
RIAU	7,67	7,41	7,21	6,90	7,04
JAMBI	8,37	7,90	7,85	7,51	7,97
SUMATERA SELATAN	13,39	13,10	12,82	12,56	12,98
BENGKULU	17,03	15,59	15,41	14,91	15,30
LAMPUNG	13,86	13,04	13,01	12,30	12,76
KEP. BANGKA BELITUNG	5,04	5,30	4,77	4,50	4,89
KEP. RIAU	5,84	6,13	5,83	5,80	6,13
DKI JAKARTA	3,75	3,78	3,55	3,42	4,69
JAWA BARAT	8,77	7,83	7,25	6,82	8,43
JAWA TENGAH	13,19	12,23	11,19	10,58	11,84
DI YOGYAKARTA	13,10	12,36	11,81	11,44	12,80
JAWA TIMUR	11,85	11,20	10,85	10,20	11,46
BANTEN	5,36	5,59	5,25	4,94	6,63
BALI	4,15	4,14	3,91	3,61	4,45
NUSA TENGGARA BARAT	16,02	15,05	14,63	13,88	14,23
NUSA TENGGARA TIMUR	22,01	21,38	21,03	20,62	21,21
KALIMANTAN BARAT	8,00	7,86	7,37	7,28	7,24

Provinsi	Persentase Penduduk Miskin (persen)				
	2016	2017	2018	2019	2020
KALIMANTAN TENGAH	5,36	5,26	5,10	4,81	5,26
KALIMANTAN SELATAN	4,52	4,70	4,65	4,47	4,83
KALIMANTAN TIMUR	6,00	6,08	6,06	5,91	6,64
KALIMANTAN UTARA	6,99	6,96	6,86	6,49	7,41
SULAWESI UTARA	8,20	7,90	7,59	7,51	7,78
SULAWESI TENGAH	14,09	14,22	13,69	13,18	13,06
SULAWESI SELATAN	9,24	9,48	8,87	8,56	8,99
SULAWESI TENGGARA	12,77	11,97	11,32	11,04	11,69
GORONTALO	17,63	17,14	15,83	15,31	15,59
SULAWESI BARAT	11,19	11,18	11,22	10,95	11,50
MALUKU	19,26	18,29	17,85	17,65	17,99
MALUKU UTARA	6,41	6,44	6,62	6,91	6,97
PAPUA BARAT	24,88	23,12	22,66	21,51	21,70
PAPUA	28,40	27,76	27,43	26,55	26,80

Sumber: www.bps.go.id

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali mengeluarkan data penduduk miskin di Indonesia. Dari ketiga daerah yang menerima Dana Otonomi Khusus, persentase kemiskinan paling tinggi berada di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh yang merupakan daerah dengan persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera.

Total Dana Otsus yang telah diterima oleh Papua dan Papua Barat dari tahun 2002 hingga tahun 2020 sebesar Rp 94,2 triliun dengan Dana Tambahan Infrastruktur sebanyak Rp 31,4 triliun. Sedangkan total Dana Otsus yang telah diterima di Provinsi Aceh dari tahun 2008 sampai 2020 sebanyak Rp 81,47 triliun.

Namun dengan dana sebesar sebesar ini, ketiga daerah yang menerima Dana Otsus masih terperangkap dalam jurang kemiskinan.

Tabel 1.2
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus
Tahun 2016 - 2020

Tahun	Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Papua	Papua Barat	Aceh
Mar-16	28,54	25,43	16,73
Sep-16	28,40	24,88	16,43
Mar-17	27,62	25,10	16,89
Mar-18	27,74	23,12	15,92
Sep-18	27,43	23,01	15,97
Mar-19	27,53	22,17	15,68
Sep-19	26,55	21,51	15,32
Mar-20	26,64	21,37	15,01
Sep-20	26,80	21,70	14,99

Sumber: www.bps.go.id

Selama periode Maret 2016 sampai dengan September 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua berfluktuasi. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin berada pada 28,54 persen, dan turun menjadi 28,40 persen di September 2016. Pada Maret 2017 kembali menurun menjadi 27,62 persen. Sedangkan pada September 2017 meningkat menjadi 27,76 persen. Penurunan kembali terjadi pada Maret 2018 menjadi 27,74 persen, di September 2018 juga terjadi penurunan menjadi 27,43 persen. Pada Maret 2019 mengalami kenaikan dari sebelumnya menjadi 27,53 persen, dan kembali turun pada September 2019 menjadi 26,55 persen. Pada bulan Maret 2020 persentase penduduk miskin di

Provinsi Papua sebesar 26,64 persen, Selanjutnya pada September 2020, persentase penduduk miskin di Papua mengalami kenaikan sebesar 26,80 persen.

Dari data di atas dapat kita lihat selama periode tahun 2016 sampai dengan September 2020 persentase penduduk miskin di Provinsi Papua Barat berfluktuasi. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin berada pada 25,43 persen, dan turun menjadi 24,88 persen di September 2016. Namun pada Maret 2017 persentase mengalami kenaikan menjadi 25,10 persen. Sedangkan pada September 2017 mengalami penurunan menjadi 23,12 persen. Penurunan kembali terjadi pada Maret 2018 menjadi 23,01 persen, di September 2018 juga terjadi penurunan menjadi 22,66 persen. Pada Maret 2019 lagi-lagi mengalami penurunan hingga Maret 2020. Pada Maret 2020 persentase kemiskinan di Papua barat sebesar 21,37 persen, dan kembali mengalami peningkatan pada September 2020 menjadi 21,70 persen.

Selama periode Maret 2016 sampai dengan September 2020 persentase penduduk miskin di Aceh berfluktuasi. Pada Maret 2016, persentase penduduk miskin mencapai 16,73 persen, dan turun menjadi 16,43 persen di September 2016. Pada Maret 2017 terjadi peningkatan kembali menjadi 16,89 persen. Sedangkan pada September 2017 kembali turun menjadi 15,92 persen. Kenaikan kembali terjadi pada Maret 2018 menjadi 15,97 persen, namun pada September 2018 kembali turun menjadi 15,68 persen. Penurunan kembali terjadi pada Maret 2019 menjadi 15,32 persen, dan kembali turun pada September 2019 menjadi 15,01 persen. Pada bulan Maret 2020 persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 14,99 persen, bertambah sebanyak 0,02 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2019 yang persentasenya sebesar 15,01 persen.

Sedangkan jika dibandingkan dengan Maret tahun 2020, persentase penduduk miskin meningkat sebanyak 0,31 persen menjadi 15,32 persen. Sedangkan pada September 2020, jumlah persentase penduduk miskin di Aceh mengalami kenaikan sebesar 0,11 persen menjadi 15,43 persen.

Pada September 2020 persentase penduduk miskin di daerah pedesaan dan perkotaan mengalami kenaikan. Di perkotaan, persentase penduduk miskin naik sebesar 0,47 persen (dari 9,84 persen menjadi 10,31 persen) dari periode Maret 2020. Sedangkan di daerah pedesaan naik sebesar 0,5 persen (dari 17,46 persen menjadi 17,96 persen) dari periode Maret 2020.

Garis kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Memperhatikan komponen Garis Kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan (sandang, pangan, papan) lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (pendidikan, kesehatan, dll). Tabel 1.4 menyajikan perkembangan garis kemiskinan pada periode Maret 2016 sampai September 2020.

Tabel 1.3**Garis Kemiskinan di Indonesia Tahun 2016 -2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2016	260.469	93.917	354.386
September 2016	264.941	97.050	361.990
Maret 2017	274.544	99.933	374.478
September 2017	283.964	103.196	387.160
Maret 2018	294.806	106.414	401.220
September 2018	302.022	108.648	410.670
Maret 2019	313.232	112.018	425.250
September 2019	324.911	115.627	440.538
Maret 2020	335.793	118.859	454.652
Semptember 2020	339.004	119.943	458.947

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat kita lihat selama periode Maret 2016 hingga September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,15 persen, yaitu dari Rp 354.386 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 361.990 per kapita per bulan pada September 2016. Selanjutnya pada periode Maret 2017 sampai September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,39 persen yaitu dari Rp 374.478 per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017. Sementara pada periode September 2016 sampai September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 6,95 persen yaitu dari Rp 361.990 per kapita per bulan pada September 2016 menjadi Rp 387.160 per kapita per bulan pada September 2017. Kemudian pada September 2018 Garis Kemiskinan sebesar Rp 410.670 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2018,

Garis Kemiskinan naik sebesar 2,36 persen. Sementara jika dibandingkan dengan September 2017, terjadi kenaikan sebesar 6.07 persen. Pada Maret 2019 Garis Kemiskinan sebesar Rp 425.250 per kapita per bulan, meningkat 3,60 persen pada September 2019 menjadi Rp 440.538 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp458.947, per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,94 persen. Sementara jika dibandingkan September 2019, terjadi kenaikan sebesar 4,18 persen.

Ketiga Provinsi yang menerima Dana Otsus memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa dari sebagian besar total penduduk dari ketiga provinsi ini memiliki pendapatan yang kurang atau masih berada dibawah garis kemiskinan.

Tabel 1.4

Garis Kemiskinan Provinsi Papua Tahun 2016 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2016	321.910	105.265	427.176
September 2016	331.243	108.778	440.021
Maret 2017	344.637	112.904	457.541
September 2017	346.106	117.951	464.056
Maret 2018	374.752	124.711	499.463
September 2018	388.844	129.968	518.811
Maret 2019	404.631	135.468	540.099
September 2019	418.367	138.869	557.236
Maret 2020	423.243	139.749	562.992
September 2020	437.370	143.093	580.463

Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Total pendapatan masyarakat Papua dari periode Maret 2016 sampai September 2020 terus meningkat. Dari tabel di atas dapat kita lihat selama periode Maret 2016 hingga September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 12.845 atau 3,01 persen, yaitu dari Rp 427.176 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 440.021 per kapita per bulan pada September 2016. Selanjutnya pada periode Maret 2017 sampai September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,40 persen yaitu dari Rp 457.541 per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 464.056 per kapita per bulan pada September 2017. Kemudian pada September 2018 Garis Kemiskinan sebesar Rp 518.811 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 19.348 atau 2,36 persen. Pada Maret 2019 Garis Kemiskinan sebesar Rp 540.099 per kapita per bulan, meningkat sebanyak Rp 17.137 atau 3,17 persen pada September 2019 menjadi Rp 557.236 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp 580.463, per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 3,10 persen.

Tabel 1.5

Garis Kemiskinan Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2020

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2016	372.548	102.419	474.967
September 2016	384.627	108.341	492.969
Maret 2017	389.400	110.377	499.778
September 2017	395.479	114.383	509.861
Maret 2018	395.435	117.927	516.362
September 2018	432.693	128.283	560.976

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2019	441.803	131.510	573.313
September 2019	453.232	138.104	591.336
Maret 2020	463.545	147.343	610.888
September 2020	465.715	150.672	616.387

Sumber: *Badan Pusat Statistik Papua Barat*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Maret 2016 hingga September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 18.002 atau 3,79 persen, yaitu dari Rp 474.967 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 492.969 per kapita per bulan pada September 2016. Selanjutnya pada periode Maret 2017 sampai September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 10.083 atau 2,02 persen yaitu dari Rp 499.778 per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 509.861 per kapita per bulan pada September 2017. Kemudian pada September 2018 Garis Kemiskinan sebesar Rp 560.976 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 44.614. Pada Maret 2019 Garis Kemiskinan sebesar Rp 573.313 per kapita per bulan, meningkat sebanyak Rp 18.023 atau 3,14 persen pada September 2019 menjadi Rp 591.336 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp 616.387 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,90 persen.

Tabel 1.6**Garis Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)		
	Makanan	Bukan Makanan	Total
Maret 2016	312.801	98.155	410.956
September 2016	323.548	101.217	424.765
Maret 2017	330.958	104.496	435.454
September 2017	346.552	107.572	454.124
Maret 2018	353.291	111.335	464.626
September 2018	361.835	114.830	476.666
Maret 2019	370.093	116.842	486.935
September 2019	384.381	120.033	504.414
Maret 2020	397.032	125.093	522.126
September 2020	398.316	125.892	524.208

Sumber: *Badan Pusat Statistik Aceh*

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Maret 2016 hingga September 2016, Garis Kemiskinan di Provinsi Aceh naik sebesar Rp 13.809 atau 3,36 persen, yaitu dari Rp 410.956 per kapita per bulan pada Maret 2016 menjadi Rp 424.765 per kapita per bulan pada September 2016. Selanjutnya pada periode Maret 2017 sampai September 2017, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 18.670 atau 4,29 persen yaitu dari Rp 435.454 per kapita per bulan pada Maret 2017 menjadi Rp 454.124 per kapita per bulan pada September 2017. Kemudian pada September 2018 Garis Kemiskinan sebesar Rp 476.666 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2018, Garis Kemiskinan naik sebesar Rp 12.040 atau 2,59 persen. Pada Maret 2019 Garis Kemiskinan sebesar Rp 486.935 per kapita per bulan, meningkat sebanyak Rp 17.479 atau 3,59 persen pada September 2019

menjadi Rp 504.414 per kapita per bulan. Garis Kemiskinan pada September 2020 adalah sebesar Rp 524.208 per kapita per bulan dibandingkan Maret 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 0,40 persen.

Dari ketiga Provinsi yang menerima Dana Otsus, posisi pertama di duduki oleh Provinsi Papua Barat memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, kemudian di susul Provinsi Papua dan Aceh. Pada September 2020 Garis Kemiskinan di Provinsi Papua Barat berada di Rp 616.387 sedangkan Provinsi Papua berada di Rp 580.463 dan Provinsi Aceh berada di Rp 524.208. Garis Kemiskinan di wilayah timur Indonesia lebih tinggi dibandingkan wilayah barat di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Diantaranya yaitu terjadinya inflasi, meskipun garis kemiskinan di Provinsi Papua Barat berada di angka Rp 616.387, namun harga kebutuhan pokok di wilayah timur Indonesia yang sangat tinggi menyebabkan masyarakat di wilayah tersebut sulit untuk memenuhi kebutuhannya. Selain itu minimnya infrastruktur, transportasi logistik, dan demografi yang berbukit –bukit juga menjadi salah satu penyebab tingginya harga kebutuhan pokok di bumi cendrawasih ini.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah atau persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu di perhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil angka kemiskinan, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks Kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P₁*) merupakan rata – rata kesenjangan pengeluaran masing–masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata – rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks

Keparahan Kemiskinan (*Poverty Sevrity Index-P₂*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus perhitungan kedua indeks ini sebagai berikut:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana:

a = 1

z = garis kemiskinan

y_i = rata – rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (i= 1,2,3,..., q), y_i < z

q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = jumlah penduduk.

Berikut ini adalah tabel Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Indonesia Tahun 2016 – 2020.

Tabel 1.7

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Papua Tahun 2016 – 2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2016	9,37	4,19
September 2016	7,43	2,65
Maret 2017	7,49	2,82

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
September 2017	6,24	1,93
Maret 2018	6,73	2,28
September 2018	5,91	1,82
Maret 2019	7,17	2,60
September 2019	6,07	1,98
Maret 2020	6,157	2,077
September 2020	6,902	2,350

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua

Jika dilihat pada periode Maret 2016 – September 2016, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Papua mengalami penurunan. Tercatat P1 turun 1,94 poin, sementara itu P2 turun sebesar 1,54 poin. Kemudian pada Maret 2017 – September 2017, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Papua mengalami penurunan. Tercatat P1 turun 1,25 poin, sementara itu P2 turun sebesar 0,89 poin. Periode Maret 2018 – September 2018 juga mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,82 poin dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan sebesar 0,46 poin. Periode Maret 2019 – September 2019 lagi-lagi mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 1,1 poin dan indeks keparahan kemiskinan (P2) sebesar 0,62 poin. Namun pada periode Maret 2020 – September 2020 indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) di provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 0,745 poin dan 0,273 poin.

Tabel 1.8**Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Provinsi Papua Barat Tahun 2016 – 2020**

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Maret 2016	7,21	2,82
September 2016	6,28	2,23
Maret 2017	6,74	2,45
September 2017	7,41	3,12
Maret 2018	6,29	2,37
September 2018	6,50	2,38
Maret 2019	5,60	1,97
September 2019	5,64	1,90
Maret 2020	5,79	2,06
September 2020	6,07	2,41

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua Barat

Jika dilihat pada periode Maret 2016 – September 2016, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan Provinsi Papua mengalami penurunan. Tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan turun 0,93 poin, sementara itu Indeks Keparahan Kemiskinan turun sebesar 0,59 poin. Kemudian pada Maret 2017 – September 2017, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 0,67 poin. Periode Maret 2018 – September 2018 juga mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,21 poin dan indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami penurunan sebesar 0,46 poin. Periode Maret 2019 – September 2019 lagi-lagi mengalami kenaikan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,04 poin dan penurunan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,07 poin. Namun pada periode Maret 2020

– September 2020 indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan di provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 0,28 poin dan 0,35 poin.

Tabel 1.9

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2) Provinsi Aceh Tahun 2016 – 2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahahan Kemiskinan (P2)
Maret 2016	3,476	0,997
September 2016	3,062	0,867
Maret 2017	2,978	0,807
September 2017	2,917	0,781
Maret 2018	2,845	0,752
September 2018	2,803	0,717
Maret 2019	2,644	0,661
September 2019	2,580	0,667
Maret 2020	2,716	0,708
September 2020	2,847	0,831

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

Jika dilihat pada periode Maret 2016 – September 2016, tercatat Indeks kedalaman kemiskinan mengalami penurunan sebesar dan keparahan kemiskinan Provinsi Aceh mengalami kenaikan. Tercatat Indeks Kedalaman Kemiskinan turun 0,414 poin, sementara itu Indeks Keparahahan Kemiskinan turun sebesar 0,13 poin. Kemudian pada Maret 2017 – September 2017, indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Papua mengalami penurunan sebesar 0,061 dan 0,026 poin. Periode Maret 2018 – September 2018 juga mengalami penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

sebesar 0,042 poin dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) mengalami penurunan sebesar 0,035 poin. Periode Maret 2019 – September 2019 lagi-lagi mengalami penurunan indeks kedalaman kemiskinan (P1) sebesar 0,064 poin dan kenaikan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,006 poin. Namun pada periode Maret 2020 – September 2020 Indeks Kedalaman dan Indeks Kearifan Kemiskinan di provinsi Papua mengalami kenaikan sebesar 0,131 poin dan 0,123 poin.

Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Kearifan Kemiskinan (P2) mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan, sementara kondisi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin juga cenderung semakin besar. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Provinsi Papua semakin mendekat dari garis kemiskinan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah dengan adanya penerapan kebijakan desentralisasi fiskal mampu mengurangi kemiskinan di daerah penerima Dana Otsus. Maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA DANA OTSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS: PROVINSI PAPUA, PAPUA BARAT, DAN ACEH)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Tingkat kemiskinan yang sangat tinggi di Provinsi yang menerima Dana Otsus dibandingkan dengan Provinsi lainnya yang berada di Indonesia.

2. Adanya kebijakan Otonomi Khusus berawal dari belum berhasilnya pemerintah mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakat Aceh, Papua, dan Papua Barat.
3. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang setiap tahunnya meningkat namun belum mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti fokus membatasi masalah pada analisis perkembangan kemiskinan di Provinsi yang menerima Dana Otonomi Khusus pasca kebijakan Desentralisasi Fiskal.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perkembangan Dana Otonomi Khusus sebagai implementasi dari desentralisasi fiskal di tiga Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus.
2. Bagaimana perkembangan indikator sosial dan ekonomi pada tiga provinsi penerima Dana Otonomi Khusus?
3. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif tentang perkembangan Dana Otonomi Khusus di tiga Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus.

2. Melakukan analisa ekonomi tentang perubahan indikator sosial dan ekonomi pada tiga provinsi penerima Dana Otonomi Khusus.
3. Melakukan estimasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Bagi Akademis

Diharapkan dapat memberi pengetahuan bagi mahasiswa dalam memahami kaitan antara kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi penerima dana Otsus dan diharapkan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya.

b. Bagi Non-Akademis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam memahami kaitan antara kebijakan desentralisasi fiskal terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Pembangunan Ekonomi

Secara umum Pembangunan Ekonomi merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki aspek kehidupan masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi secara luas didefinisikan sebagai pembangunan yang terjadi melalui proses multidimensional yang dimana didalamnya terdapat berbagai macam variabel dari perubahan besar yang dimana terjadi dalam sebuah struktur sosial, sikap dari masyarakat, berbagai macam kelembagaan nasional dan juga percepatan dari pertumbuhan ekonomi, dan juga pengurangan serta ketidakmerataan, dan yang terakhir adalah penghapusan dari kemiskinan mutlak (Todaro, 2000). Proses pembangunan yang terjadi di masyarakat memiliki beberapa tujuan, yaitu peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup, dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dalam Todaro dan Smith, (2006).

Pembangunan ekonomi juga merupakan suatu proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru,

dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah. Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara (Jhingan, 2014).

Pembangunan memiliki konsep melalui proses yang meningkatkan kualitas kehidupan dan kemampuan umat manusia dengan cara menaikkan standar kehidupan, harga diri, dan kebebasan individu dalam Todaro . Oleh karena itu, pembangunan haruslah dipandang sebagai proses multidimensi yang melibatkan berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional serta percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Upaya pembangunan juga untuk mengubah kondisi kehidupan dari yang dipandang tidak memuaskan menjadi lebih baik secara lahir dan batin (Todaro & Smith, 2011).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro & Smith, 2011)

Todaro dalam (Arsyad 1999:5) juga mengatakan bahwa keberhasilan suatu pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok. Nilai pokok tersebut meliputi: pertama, berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*). Kedua, meningkatnya rasa harga diri (*selfesteem*) masyarakat sebagai manusia; dan ketiga, meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pembangunan adalah kenyataan fisik sekaligus keadaan mental dari suatu masyarakat, melalui kombinasi tertentu dari proses, sosial, ekonomi, dan lembaga yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Apapun komponen yang tercakup dalam kehidupan yang lebih baik itu, pembangunan di semua masyarakat setidaknya harus memiliki tujuan (Todaro & Smith, 2011).

Salah satu dampak negatif dari perubahan struktural tersebut adalah meningkatnya arus urbanisasi yang akan menghambat proses pemerataan hasil pembangunan, di mana peningkatan pendapatan hanya akan terjadi di perkotaan. Sementara itu di sektor pedesaan yang ditinggalkan para pekerja akan mengalami pertumbuhan yang lambat, sehingga akan semakin memperlebar jurang pemisah antara desa dan kota. Transformasi struktural hanya akan berjalan dengan baik jika diikuti dengan pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, dan penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal itu dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan yang terjadi secara simultan. (Todaro & Smith, 2011).

A. Teori Aliran Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith adalah ahli ekonomi klasik yang dianggap paling terkemuka. Karyanya yang sangat terkenal, adalah sebuah buku yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang diterbitkan 1776, terutama menyangkut permasalahan pembangunan ekonomi. Walaupun ia tidak memaparkan teori pertumbuhan secara sistematis namun teori yang berkaitan dengan itu kemudian disusun oleh para ahli ekonomi berikutnya seperti akan dijelaskan di bawah ini:

a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya sendiri. Smith pada dasarnya menentang setiap campur-tangan pemerintah dalam industri perniagaan. Ia adalah seorang penganut paham perdagangan bebas dan penganjur kebijaksanaan “pasar bebas” dalam ekonomi. Kekuatan yang tidak terlihat, yaitu pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimumkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith, yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. Ia

menghubungkan kenaikan itu dengan: pertama, meningkatnya keterampilan pekerja. Kedua, penghematan waktu dalam memproduksi barang. ketiga, penemuan yang sangat menghemat tenaga. Penyebab yang terakhir dari kenaikan produktivitas ini bukan berasal dari tenaga kerja tetapi dari modal. Teknologi majulah yang melahirkan pembagian kerja dan perluasan pasar. Tetapi apa yang mengarahkan pada pembagian kerja adalah kecenderungan tertentu pada sifat manusia, yaitu kecenderungan untuk tukar-menukar, barter dan mempertukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Akan tetapi pembagian kerja tergantung pada besarnya pasar.

c. Proses Pemupukan Modal

Adam Smith menekankan, pemupukan modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Ia menulis “karena pemupukan stok dalam bentuk barang harus lebih dulu dilakukan sebelum pembagian kerja, maka pekerjaan hanya dapat dibagi lebih lanjut secara seimbang, jika stok lebih dulu diperbesar. Seperti ahli ekonomi modern, Smith menganggap pemupukan modal sebagai satu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi; dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal. “Modal suatu bangsa meningkat dengan cara yang sama seperti meningkatnya modal perorangan yaitu dengan jalan memupuk dan menambah secara terus-menerus tabungan yang mereka sisihkan dari pendapatan.” Maka dari itu, cara yang paling cepat ialah dengan menanamkan modal sedemikian rupa sehingga-dapat memberikan penghasilan yang paling besar kepada seluruh penduduk agar mereka sanggup menabung sebanyak-banyaknya. Dengan

demikian tingkat investasi akan ditentukan oleh tingkat tabungan dan tabungan yang sepenuhnya diinvestasikan.

2. Teori Schumpeter

Menurut Schumpeter pembangunan ekonomi adalah perubahan yang spontan dan terputus-putus (*discontinuous*) pada saluran-saluran arus sirkuler yaitu merupakan gangguan terhadap keseimbangan yang selalu mengubah dan mengganti keadaan keseimbangan yang ada sebelumnya (Jhingan, 2010). Pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal (Jhingan, 2010).

Makna pembangunan ekonomi menurut Schumpeter yang mengasumsikan adanya perekonomian persaingan sempurna yang berada dalam keseimbangan mantap. Dalam keseimbangan yang mantap itu terkandung keseimbangan persaingan sempurna. Keseimbangan itu ditandai oleh apa yang menurut istilah Schumpeter disebut “arus sirkuler” yang senantiasa berulang kembali dengan cara yang sama dari tahun ke tahun. Dengan kata lain, semua kegiatan ekonomi selalu berulang dalam suatu alur perekonomian yang tak habis-habisnya. Menurut Schumpeter, arus sirkuler adalah suatu aliran yang hidup dari sumber tenaga buruh dan lahan pertanian yang mengalir secara terus-menerus, dan aliran tersebut mengalir pada setiap periode ekonomi ke dalam waduk yang kita sebut dengan pendapatan, untuk dialihkan ke dalam pemuasan keinginan.(Jhingan, 2010).

Schumpeter menggambarkan proses pembangunan kapitalis ini sebagai suatu destruktif kreatif, yang membuat struktur ekonomi masyarakat lama terus-

menerus diruntuhkan dan struktur baru terus dibangun di atasnya. Secara singkat, pengusaha merupakan tokoh kunci utama di dalam analisa Schumpeter. Mereka menghasilkan pembangunan ekonomi dalam cara yang spontan dan terputus-putus. Dan gerakan siklis merupakan biaya pembangunan ekonomi dibawah kapitalisme, suatu ciri tetap perjalannya yang dinamis. Penerapan teori Schumpeter pada Negara terbelakang begitu terbatas seperti perbedaan tatanan sosio-ekonomi, kurangnya kewirausahaan, tidak dapat diterapkan pada Negara sosialis, tidak dapat diterapkan pada ekonomi campuran, yang dibutuhkan adalah perubahan kelembagaan dan bukan inovasi, mengabaikan konsumsi, tabungan, pengaruh eksternal, pertumbuhan dan penduduk. Walaupun demikian, teori Schumpeter menggaris bawahi pentingnya pembiayaan inflasioner dan inovasi sebagai faktor utama dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2010).

3. Teori David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Todaro). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). Melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para

pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi (Jhingan, 2010) .

Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
2. Berlakunya hukum : “ law of deminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap
4. Permintaan gandum benar – benar inelastik
5. Buruh dan Modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Teori David Richardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bilamana faktor – faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat

bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

4. Teori Arthur Lewis

Teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu:

- Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa di daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum law of diminishing return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian,

nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

- **Perekonomian Industri**

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktifitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan output yang diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

Perbedaan tenaga kerja dari desa ke kota dan pertumbuhan pekerja di sektor modern akan mampu meningkatkan ekspansi output yang dihasilkan di sektor modern tersebut. Percepatan ekspansi output sangat ditentukan

oleh ekspansi di sektor industri dan akumulasi modal di sektor modern. Akumulasi modal yang nantinya digunakan untuk investasi hanya akan terjadi jika terdapat akses keuntungan pada sektor modern, dengan asumsi bahwa pemilik modal akan menginvestasikan kembali modal yang ada ke industri tersebut (Jhingan, 2010).

5. Teori Hollis B. Chenery

Chenery tentang Analisis teorinya *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*) (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan struktural itu sendiri. Dengan keberadaan lag inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi

struktural tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktifitas yang sama dengan pekerja di sektor industri pada masa tansisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyeluruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011).

B. Teori Aliran Neo-Klasik

Teori ini berkembang pada pertengahan tahun 1950-an. Analisis pertumbuhan ekonominya didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Teori ini menyanggah Teori Keynesian yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terletak pada tingkat pengeluaran (konsumsi) masyarakat. Menurut teori ini, pertumbuhan terletak pada penawaran (supply) faktor produksi dan tingkat produksi. Semakin tinggi tingkat sumber ekonomi dan teknologi, maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Berikut merupakan beberapa penjelasan mengenai paradigma pembangunan neo-klasik. Pendapat neo-klasik mengenai perkembangan ekonomi dapat diikhtisarkan sebagai berikut, Neo-klasik merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi. Menurut neo-klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Pada suatu tingkat tertentu, tingkat bunga menentukan tingginya tingkat investasi.

Perkembangan merupakan proses yang gradual. Perkembangan merupakan proses yang bertahap dan berlangsung terus-menerus. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif. Proses perkembangan meliputi semua factor yang terlibat itu tumbuh bersama. Sebagai contoh alat-alat produksi yang tersedia akan memiliki tingkat produktivitas tinggi bila faktor sumber daya manusianya

juga mendukung. Aliran neo-klasik merasa optimis terhadap perkembangan. Aliran sebelumnya (klasik) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi terhambat karena terbatasnya sumber daya alam, sedangkan aliran neo-klasik yakin bahwa manusia mampu mengatasi keterbatasan tersebut. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut. Dengan adanya pasar yang luas, memungkinkan produksi sebesar-besarnya sehingga produktivitas semakin meningkat.

Menurut teori neo-klasik, negara merupakan unit analisis utama, penekanan ini secara implisit menyatakan cara pandang neo-klasik terhadap sejarah yang linear dan suatu asumsi bahwa negara per negara bisa maju dengan usaha sendiri serta berkembang dari keadaan belum maju atau terbelakang menjadi progresif.

Prinsip kunci pandangan neo-klasik tentang pembangunan adalah memaksimalkan keuntungan bagi konsumen dan produsen secara individual, keuntungan bersama yang bisa diperoleh dari perdagangan nasional dan Internasional, serta pencapaian kemajuan ekonomi dan sosial dengan cara mengejar kepentingan pribadi yang senantiasa dicerahkan. Kenyataannya, keuntungan yang diharapkan jarang terpenuhi dan prinsip-prinsip itu sendiri sedikit berhubungan, atau tidak berjalan seiring dengan realitas ekonomi atau realitas sosial. Ini terjadi juga di negara-negara maju, terlebih lagi di negara-negara belum maju. Ketika beberapa negara baru memperoleh kebebasannya (kemerdekaan), pembangunan dibidang ekonomi perlu dilakukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Berbagai cara, pendekatan, dan tindakan dilakukan dalam hal kebijakan dan prioritas pembangunan semata-mata dimaksudkan untuk menyejahterakan seluruh masyarakatnya.

C. Teori Aliran Keynesian

Ekonomi Keynesian merupakan nama suatu teori ekonomi yang diambil dari John Maynard Keynes, seorang ekonom Inggris yang hidup antara tahun 1883 sampai 1946. Beliau dikenal sebagai orang pertama yang mampu menjelaskan secara sederhana penyebab dari *Great Depression*. Teori ekonominya berdasarkan atas hipotesis siklus arus uang, yang mengacu pada ide bahwa peningkatan belanja (konsumsi) dalam suatu perekonomian, akan meningkatkan pendapatan yang kemudian akan mendorong lebih meningkatnya lagi belanja dan pendapatan. Teori Keynes ini menelurkan banyak intervensi kebijakan ekonomi pada era terjadinya *Great Depression*.

Pada Teori Keynes, konsumsi yang dilakukan oleh satu orang dalam perekonomian akan menjadi pendapatan untuk orang lain pada perekonomian yang sama. Sehingga apabila seorang membelanjakan uangnya, ia membantu meningkatkan pendapatan orang lain. Siklus ini terus berlanjut dan membuat perekonomian dapat berjalan secara normal. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat secara alami bereaksi dengan menahan belanja dan cenderung menimbun uangnya. Hal ini berdasarkan Teori Keynes akan mengakibatkan berhentinya siklus perputaran uang dan selanjutnya membuat perekonomian lumpuh.

Solusi Keynes untuk menerobos hambatan perekonomian ini adalah dengan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Ia berpendapat bahwa pemerintah harus campur tangan dalam peningkatan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan suplai uang atau dengan melakukan pembelian barang

dan jasa oleh pemerintah sendiri. Selama terjadi Great Depression, hal ini bagaimanapun merupakan solusi yang tidak populer. Namun demikian, belanja pertahanan pemerintah yang dicanangkan oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt membantu pulihnya perekonomian Amerika Serikat.

Aliran Ekonomi Keynesian, menganjurkan supaya sektor publik ikut campur tangan dalam meningkatkan perekonomian secara umum, dimana pendapat ini bertentangan dengan pemikiran ekonomi yang populer saat itu – *laissez-faire capitalism* (teori kapitalisme). Kapitalisme murni merupakan teori yang menentang campur tangan sektor publik dan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan akan mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes berpendapat bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian, karena pada umumnya seperti yang dikatakan oleh pemikir beraliran sosialis, pihak swasta bertujuan utama untuk mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dan apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan. Oleh karena itu, agar kegiatan swasta dapat terjamin berada pada jalur yang tepat, maka harus ada satu otoritas yang mengendalikan dan mengatur perekonomian tersebut. Otoritas tersebut tentu saja adalah pemerintah (Jhingan, M.L, 2010).

D. Teori Harrod-Domar

Teori ini dikembangkan oleh R.F Harrod dan Evsey Domar. Dalam teori ini menjelaskan tentang persyaratan–persyaratan yang dibutuhkan suatu negara agar perekonomian negara dapat tumbuh dan berkembang baik. Model Harrod-Domar

merupakan perkembangan langsung dari teori makro Keynes yang mengatakan bahwa investasi akan meningkatkan perekonomian dalam jangka pendek. Dalam hal ini Harrod-Domar memperluas teori Keynes tentang keseimbangan pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang dengan melihat pengaruh investasi pada permintaan agregat dan pertumbuhan kapasitas produksi. Teori Keynes lebih memperhatikan pada tingkat pendapatan yang stabil, berdasarkan kesempatan kerja penuh.

Teori Harrod-Domar ini mempunyai beberapa asumsi sebagai berikut :

- a. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (full employment) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian yang terdiri dari dua sektor yaitu rumah tangga dan sektor perusahaan, berarti pemerintah dan perdagangan luar negeri tidak ada.
- c. Besarnya tabungan masyarakat adalah proporsional dengan besarnya pendapatan nasional, berarti fungsi tabungan dimulai dari titik nol.
- d. Kecenderungan untuk menabung (marginal propensity to save = MPS) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (capital-output ratio = COR) dan rasio pertambahan modal-output (incremental capitaloutput ratio = ICOR)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian harus menabung bagian tertentu dari pendapatannya untuk sekedar mengganti barang – barang modal yang habis atau rusak (gedung, peralatan, dan bahan – bahan). Akan tetapi, untuk bisa

tumbuh diperlukan adanya investasi yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal. Jika kita mengasumsikan adanya hubungan ekonomi langsung antara jumlah total persediaan modal, K , dan total GDP, Y -misalnya, jika \$3 dari modal selamanya diperlukan untuk menghasilkan tambahan GDP tahun sebesar \$1- berarti setiap tambahan neto pada persediaan dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan dalam arus output nasional (*national output*), GDP.

E. Konsep Millenium Development Goals (MDG's) toSDG's

Pada bulan September tahun 2000, sebanyak 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menyetujui dan digagas *Millenium Development Goals* (MDGs) atau tujuan pembangunan milenium yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015, dengan berbagai tujuan dan target yakni :

- 1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem
- 2) Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua
- 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
- 4) Menurunkan angka kematian anak
- 5) Meningkatkan kesehatan ibu
- 6) Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya
- 7) Memastikan kelestarian lingkungan
- 8) Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan

Kedelapan tujuan tersebut bila melihat pencapaian pembangunan yang telah mencapai batas waktu yakni tahun 2015, mungkin masih banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan

pada MDGs ternyata mendapat sorotan dan kritikan. Kritik-kritik tersebut antara lain tujuan dan target MDGs disusun melalui proses yang sangat birokratis dan teknokatis. Kedua, desain dari tujuan dan target tersebut juga dikritik oleh beragam perspektif. Sebagai misal, tidak ada perhatian yang cukup terhadap persoalan ketimpangan dan kesetaraan gender dalam tujuan-tujuan MDGs. Ketiga, tujuan, target, dan indicator yang ada merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap atau bahkan tidak ada. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan universalitas terutama untuk negara-negara donor dalam memenuhi tujuan ke-8 dari MDGs (UNDP, 2015).

Setelah era MDGs yang telah berakhir pada 2015, kini sedang disusun sebuah dokumen pembangunan baru untuk melanjutkan capaian-capaian yang belum sempat terealisasi sembari menyempurnakan target-target yang lebih relevan dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat. Oleh karena itu, pembangunan pasca-2015 tersebut mulai disusun dengan mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan termasuk soal ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inklusif, masyarakat damai dan beberapa persoalan lainnya. Penyempurnaan tersebut melahirkan tujuan dan target yang tersusun dalam 17 poin tujuan dan 169 target *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030.

Bila disimpulkan tujuan dan target SDGs atau pembangunan pasca-2015 ini yang akan berlaku hingga 2030, dimensi pokoknya terletak pada persoalan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang bersinggungan satu sama lain (UNDP, 2015). Keterhubungan antara dimensi tersebut, menuntut sebuah proses pengawalan yang

serius agar tidak terjadi tumpang tindih antara berbagai dimensi yang dikelola oleh berbagai bidang dalam pemerintahan.

2.1.2 Pengeluaran Negara

Pengeluaran Negara Pengeluaran negara adalah pengeluaran pemerintah yang menyangkut pengeluaran untuk membiayai program-program dimana pengeluaran itu diajukan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Instrumen pusat dari kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Dalam membicarakan penyebab pokok dari pertumbuhan pengeluaran, harus dilakukan pembedaan antara pengeluaran untuk barang dan jasa, dan pengeluaran untuk transfer, karena adanya faktor-faktor yang agak berbeda (Musgrave & B Musgrave, 1993).

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pembangunan secara umum. APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN. Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya. Walaupun memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total penerimaan anggaran, jumlahnya semakin meningkat secara signifikan tiap tahunnya sedangkan dana

yang diterima dialokasikan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

1. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2. Wagner

Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di negara-negara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori

ini di dasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesebroto, 1993). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{PkPPP1} & \text{PkPPP2} & \text{PkPPPn} \\
 \hline
 \text{PPK1} & \text{PPK2} & \dots \quad \text{PPKn}
 \end{array}$$

Keterangan:

PPP: Pengeluaran Pemerintah Perkapita

PPK: Pendapatan Perkapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

n: jangka waktu (tahun)

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan olehkurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesebroto, 1993).

3. Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk

menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

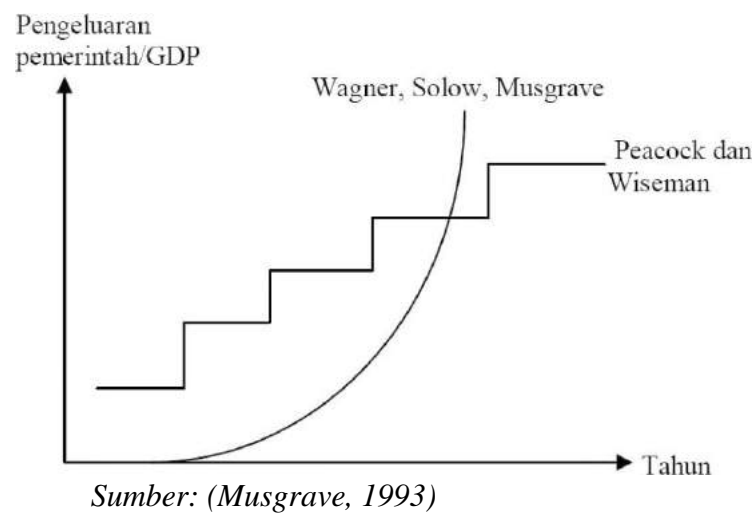
Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelumperang.

Dalam Mangkoesobroto (1993) Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan

pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

Gambar 2.1
Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah



2.1.3 Kemiskinan

Menurut World Bank dalam Kumalasari (2011), mendefinisikan kemiskinan sebagai kekurangan dalam kesejahteraan, dan terdiri dari banyak dimensi. Ini termasuk berpenghasilan rendah dan ketidakmampuan untuk mendapatkan barang dasar dan layanan yang diperlukan untuk bertahan hidup dengan martabat. Kemiskinan juga meliputi rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan, akses masyarakat miskin terhadap air bersih dan sanitasi, keamanan fisik yang tidak memadai, kurangnya suara, dan kapasitas memadai serta kesempatan untuk hidup yang lebih baik itu.

Kemiskinan menurut BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Menurut Levitan dalam Badruddin (2009), mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak. Friedman yang juga mengemukakan bahwa kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisasi sosial politik yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kemiskinan absolut, kondisi dimana seseorang apabila pendapatannya dibawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan

pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang dibutuhkan untuk bisa hidup dan bekerja.

2. Kemiskinan relatif, kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
3. Kemiskinan kultural, mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.
4. Kemiskinan struktural, situasi miskin yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

2.2 Regulasi Pemerintah

2.2.1 Otonomi Daerah

Sistem pemerintahan republik Indonesia mengatur asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan yang dilaksanakan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan pelaksanaan asas desentralisasi tersebut maka dibentuk daerah otonomi daerah yang terbagi dalam daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang bersifat otonom. Selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Otonomi daerah merupakan alternatif pemecahan masalah kesenjangan pembangunan, terutama dalam konteks pemberdayaan pemerintah daerah yang selama ini dipandang hanya sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat. Menurut UU No.22 tahun 1999, otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat.

Pada masa sebelum otonomi daerah, semua wewenang pemerintah dipegang oleh pemerintah pusat, daerah hanya sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat. Adanya otonomi daerah membuat wewenang pemerintah daerah semakin besar. Kewenangan daerah mencakup dalam bidang pemerintahan kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, kebijakan tentang perencanaan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, system administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pemberdayaan sumber daya alam serta teknologi yang strategis, konversi dan standarisasi nasional.

Prinsip pemberian otonomi daerah kepada pemerintah daerah pada dasarnya untuk memberikan wewenang lebih besar kepada daerah agar dapat membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pada masa sekarang ini titik berat pemberian otonomi daerah diberikan kepada

daerah tingkat II dan bukan kepada daerah tingkat I atau desa, karena pemerintah daerah tingkat II dianggap sebagai tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya.

2.2.2 Desentralisasi Fiskal

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi fiskal adalah salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola pembangunan guna mendorong perekonomian daerah maupun nasional melalui mekanisme hubungan keuangan yang lebih baik agar tercipta kemudahan kemudahan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah, sehingga berimbas kepada kondisi perekonomian yang lebih baik yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat (Rochjadi, 2004).

Dalam teori ekonomi publik dibahas mengenai berbagai permasalahan yang berkenaan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan pusat. Musgrave menjelaskan tentang ketiga fungsi pokok pemerintahan yang terdiri dari fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurut Musgrave terdapat dua faktor yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan apakah secara ekonomi suatu fungsi akan lebih baik dilaksanakan terpusat (sentralisasi) ataukah didesentralisasikan. Faktor yang pertama adalah eksternalitas dan uang, yang kedua ialah preferensi (Azwardi & Abukosim, 2007).

Selanjutnya Boex dan Martinez-Vazquez mengemukakan empat pilar desentralisasi fiskal, yaitu melalui desentralisasi fiskal terjadi pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah, meliputi pengeluaran, penerimaan, transfer, dan pinjaman daerah yang dipertanggung jawabkan kepada masyarakat (Azwardi & Abukosim, 2007).

Pada dasarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dapat dibedakan atas bagi hasil pendapatan (revenue sharing) dan bantuan (grants). Adapun tujuan dari transfer ini adalah pemerataan vertikal (vertical equalization), pemerataan horizontal (horizontal equalization), mengatasi persoalan efek pelayanan publik (correcting spatial externalities), mengarahkan prioritas (redirecting priorities), melakukan eksperimen dengan ide- ide baru, stabilisasi dan kewajiban untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum (SPM) di setiap daerah (Hermawan, 2007).

Di dalam peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.07/2013 tentang pengalokasian anggaran transfer ke daerah, transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) yang dialokasikan kepada daerah. TKDD terdiri dari 4 (empat) unsur utama, yaitu:

1. Dana Perimbangan; Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi, dan juga bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintahan daerah terdiri dari:

- (i) Dana Transfer Umum (DTU), yaitu jenis dana transfer yang dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dengan memperhatikan aspek otonomi, serta keseimbangan dan pemerataan kemampuan keuangan daerah, meliputi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
 - (ii) Dana Transfer Khusus (DTK), yaitu dana yang dialokasikan ke daerah untuk mendanai kegiatan yang sudah diarahkan atau ditentukan penggunaannya untuk meningkatkan layanan publik dan pencapaian prioritas nasional, terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non-fisik.
2. Dana Insentif Daerah (DID), yang dialokasikan untuk memberikan insentif dan sekaligus sebagai instrumen untuk memacu peningkatan kinerja daerah dalam pengelolaan keuangan, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan dasar publik, serta kesejahteraan masyarakat.
 3. Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Tambahan Infrastruktur (DTI), dan Dana Keistimewaan (Dais), yaitu jenis dana transfer yang dialokasikan khusus untuk daerah-daerah yang mendapatkan kebijakan otonomi asimetri sesuai undang-undang, yaitu Provinsi DI Yogyakarta.
 4. Dana Desa, yang dialokasikan kepada desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa dari APBN untuk mendanai pembangunan desa dan

pemberdayaan masyarakat sesuai dengan undang- undang mengenai desa.

2.3 Penelitian Terdahulu

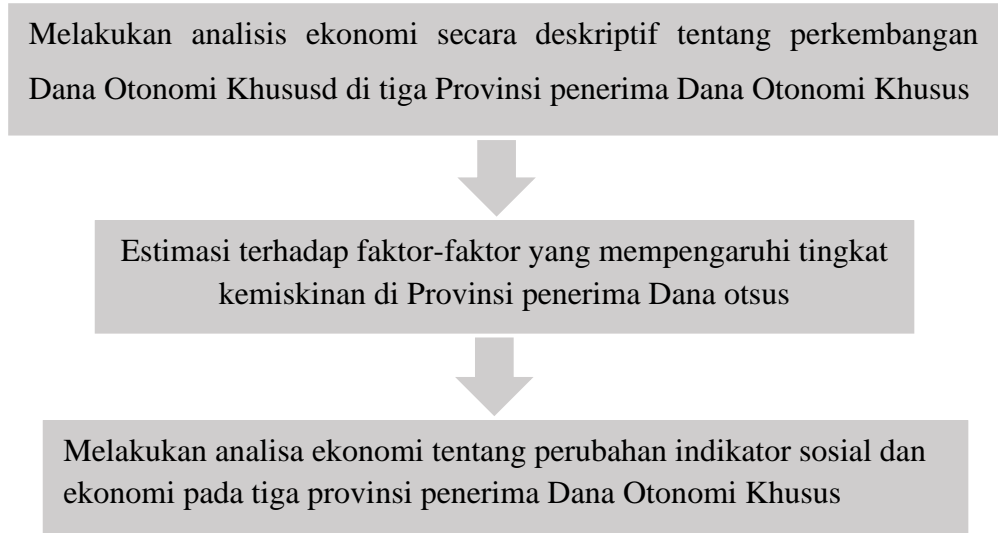
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Hadi Sasana	Analisis Determinan Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi dan Desentralisasi Fiskal	Belanja Daerah, PDRB, Dana Perimbangan, PAD, dan jumlah Peenduduk	PDRB, dana perimbangan, dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan belanja pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat. PDRB berhubungan positif dengan belanja daerah, dan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah daerah ber-hubungan positif dengan belanja daerah, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan dengan belanja daerah. Hal ini mengingat relatif kecilnya sumbangan PAD terhadap total belanja di masing-masing daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.
Ni Nyoman Ayu Sudewi	Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.	Kemiskinan, Pertumbuhan ekonomi	desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan secara parsial desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi

			berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan
Atanasius Widarwanto, Erlina, Idhar Yahya	Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) Terhadap IPM Dengan Belanja Pelayanan Dasar (BPD) Sebagai Moderating Variabel	Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), dana Alokasi Khusus (DAK), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).	<p>Pertumbuhan Ekonomi (PE) terbukti tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM),</p> <p>Dana Alokasi Khusus (DAK) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM), dan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (PABM) yang diproksikan dengan Belanja Modal (BM) terbukti berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).</p>

2.4 Kerangka Konseptual

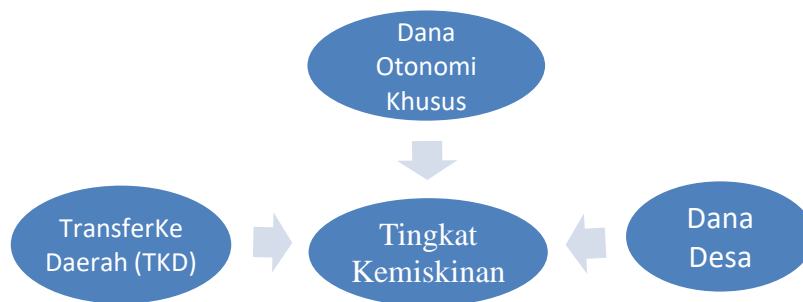
Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini digunakan sebagai berikut:



Gambar 2.2

Kerangka Analisis Penelitian

2.4.1 Kerangka Model Estimasi



Gambar 2.3

Kerangka Model Estimasi

Dalam kerangka model estimasi variabel Transfer Ke Daerah, Dana Otsus, dan Dana Desa, merupakan variabel bebas yang mempengaruhi secara

langsung terhadap Tingkat Kemiskinan yang dimana Tingkat Kemiskinan merupakan variabel terikat.

2.5 Hipotesis

Berdasarkan tujuan penelitian, landasan teori dan penelitian–penelitian terdahulu, diduga terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara Transfer Ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa, terhadap Tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungan. (Kuncoro,2015).

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi dan menganalisis hubungan antara variabel yang telah ditentukan dengan menggunakan data kuantitatif untuk menjawab rumusan masalah. Data yang disajikan adalah panel data yaitu dimana penelitian menggunakan data *cross section*, data yang diteliti lebih dari satu; dan *timeseries*, yaitu waktu yang dihimpun pada tahun yang berbeda secara bersamaan. Data yang diteliti adalah Provinsi yang menerima Dana Otonomi Khusus yaitu Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat pada tahun 2017 sampai 2021.

3.2 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan acuan dari tinjauan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan variabel yang lain dapat dihubungkan sehingga penelitian ini dapat disesuaikan dengan data yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini adalah:

Tingkat Kemiskinan, TKD (Transfer Ke Daerah), Dana Otonomi Khusus (Otsus), dan Dana Desa, sehingga definisi operasional dari penelitian ini adalah:

Tabel 3.1
Defenisi Operasional

Variabel	Jenis Variabel	Defenisi Operasional	Sumber Data
Tingkat Kemiskinan	Variabel Terikat	Persentase kemiskinan (persen)	Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id
Transfer Ke Daerah (TKD)	Variabel Bebas	Bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian. (milyar rupiah)	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) www.djpk.kemenukeu.go.id
Dana Otonomi Khusus (Otsus)	Variabel Bebas	Dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus pelaksanaan desentralisasi fiskal (triliun rupiah)	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) www.djpk.kemenuku.go.id
Dana Desa	Variabel Bebas	Indeks Pembangunan Desa menuju Provinsi (milyar rupiah)	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) www.djpk.kemenuku.go.id

3.3 Tempat dan Waktu Penelitiann

Tempat Penelitian ini dilakukan diProvinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat. Dan waktu penelitian direncanakan selama enam bulan yaitu Februari 2021 sampai Juli 2021.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumber yaitu data sekunder, merupakan data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Berdasarkan bentuk adalah data kuantitatif, data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sedangkan berdasarkan waktu adalah data panel, merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu (Kuncoro, 2013).

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) www.djpk.kemenkeu.go.id melalui *website* resmi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan melalui *website resmi* Badan Pusat Statistik (BPS) www.bps.go.id dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan www.djpk.kemenkeu.go.id Kemudian Penelitian kepustakaan (*library research*) juga dilakukan untuk memperoleh landasan teoritis yang dapat menunjang dan dapat digunakan sebagai tolak ukur pada penelitian ini. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji literatur-literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, majalah, dan artikel yang menyangkut tentang kemiskinan dan desentralisasi fiskal.

3.6 Model Estimasi

$$TK_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot TKD_{rt} + \alpha_2 \cdot DOK_{rt} + \alpha_3 \cdot DD_{rt} + \varepsilon_f \dots \dots \dots (3-1)$$

Dimana:

- TK_{rt} = Tingkat Kemiskinan
- TKD_{rt} = Transfer Ke Daerah
- r = *cross section* (Papua, Papua Barat, dan Aceh)
- t = Periode waktu (2017-2021)
- DOK_{rt} = Dana Otonomi Khusus (Otsus)
- DD_{rt} = Dana Desa
- α_0 = Konstanta
- $\alpha_{1, \dots, 3}$ = Parameter dari setiap variabel bebas
- ε_f = *Error Term*

3.7 Metode Estimasi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode regresi linier, tekniknya adalah OLS (*Ordinary Least Square*). Inti metode OLS adalah mengestimasi suatu garis regresi dengan jalan meminimalkan jumlah kuadrat kesalahan setiap observasi terhadap garis tersebut. Menurut Teorema Gauss-Markov, setiap pemerkira/estimator OLS harus memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*) dalam Gujarati (1995).

Asumsi-asumsi yang mendasari model regresi linear dengan menggunakan metode OLS adalah sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata disturbance tern = 0
2. Tidak terdapat Korelasi serial (*serial auto correlation*) diantara disturbance tern $COV(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0 : i \neq j$
3. Sifat momocidentecity dari disturbance tern $Var(\epsilon_i) = \sigma^2$
4. Covariance antar ϵ_i darisetiap variabel bebas(x) = 0 setiap variabel bebas
(x) = 0

5. Tidak terdapat bias dalam spesifikasi model regresi. Artinya, model regresi yang diuji secara tepat telah dispesifikasikan atau diformulasikan.
6. Tidak terdapat *collinearity* antara variabel-variabel bebas. Artinya, variabel - variabel bebastidakmengandung hubungan liniertertentu antara sesamanya.
7. Jika model berganda yang diestimasi melalui OLS memenuhi suatu set asumsi (*asumsi gauss-markov*), maka dapat ditunjukkan bahwa parameter yang diperoleh adalah bersifat BLUE (*best linear unbiased estimator*). (Kuncoro, 2013).

3.8 Teknik Analisis

3.8.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode analisa sederhana yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi observasi dengan menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, maupun narasi dengan tujuan untuk memudahkan pembaca dalam menafsirkan hasil penelitian.

3.8.2 Metode Regresi Linear Berganda

1. Penaksiran

a) Koefisien Korelasi (R)

Koefisien korelasi adalah nilai yang ditunjukkan kuat atau tidaknya suatu hubungan linier antara variabel Transfer ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa terhadap Tingkat Kemiskinan. hubungan linier antara dua variabel koefisien korelasi biasanya dilambangkan dengan huruf r dimana bervariasi antara -1 sampai $+1$ menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut nilai r

yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut sedangkan tanda + (positif) dan - (negatif) memberikan informasi mengenai arah dari hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai + (positif) maka kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang searah, dalam arti lain peningkatan X akan bersamaan dengan peningkatan Y dan begitu juga sebaliknya. Jika bernilai - (negatif) artinya korelasi antara dua variabel tersebut bersifat berlawanan peningkatan nilai X akan dibarengi dengan penurunan nilai Y.

b) Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, koefisien determinasi (R^2) menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted* R^2 yang dirumuskan (Gujarati, 2006).

$$Adjusted R^2 = 1 - R^2 - \left(\frac{-1}{n-k}\right) \dots\dots\dots(3-2)$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

n: Jumlah Sampel

k: Jumlah Variabel Independen

2. Pengujian (*Test Diagnostic*)

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (TKD, DOK, dan DD) secara parsial terhadap variabel terikat (TK). Nilai t dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$T = \frac{\alpha_i}{se.\alpha_i} \dots\dots\dots(3-3)$$

dimana: α_i = koefisien regresi,

se = Standar error

Dibandingkan dengan $t_{tabel} = \pm t(\alpha/2, n - 1)$

Kriteria Uji:

Terima H_0 jika $-t_{tabel} < t_{hitung} < +t_{tabel}$, hal lain tolak H_0

Atau dalam distribusi kurva normal t dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1

Grafk Kriteria Pengujian Hipotesis



Atau dalam olahan *software*, dikatakan signifikan jika nilai $\text{sig} < \alpha = 5\%, 10\%$.

b) Uji Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pada model I apakah variabel TKD, DOK, dan DD secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel TK. Uji F dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$F = \frac{R^2/k-1}{(1-R^2)/(N-K)} \dots\dots\dots(3-4)$$

Dimana: K = Jumlah parameter yang diestimasi

N = Jumlah Observasi

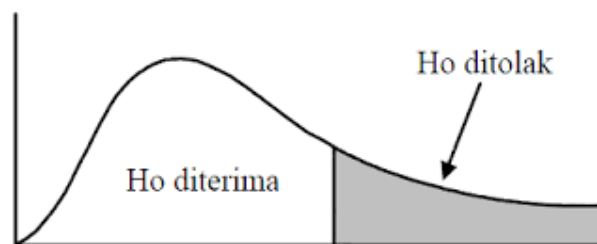
Dibanding dengan $F_{tabel} = F(\alpha, n - k - 1)$

Kriteria Uji:

Terima H_0 jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, hal lain tolak H_0 .

Atau dalam distribusi kurva F dalam digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.2
Grafik Kriteria Pengujian Hipotesis



Atau dalam olahan software, dikatakan signifikan jika nilai sig < $\alpha = 5\%$

c) Uji Asumsi klasik

Penggunaan OLS mensyaratkan pemenuhan beberapa asumsi (disebut asumsi klasik: Gauss-Markov). Jika asumsi ini dipenuhi, maka parameter yang diperoleh dengan OLS adalah bersifat *Best Linier Unbiased Estimator* (BLUE). Dalam praktiknya, sangat mungkin sekali satu atau lebih asumsi tersebut tidak dapat dipenuhi. Dengan demikian estimator OLS tidak lagi BLUE. Pada kasus yang ekstrem, estimator dan/atau pengujian hipotesis bahkan tidak dapat dilakukan. Dalam bagian ini akan

dibahas suatu pelanggaran asumsi klasik yang sering terjadi yakni autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas (Ariefianto, 2012).

1. Autokorelasi

Autokorelasi adalah fenomena model (Vogelvang, 2005). Ia timbul dari spesifikasi yang tidak tepat terhadap hubungan antara variabel endogonous dengan variabel penjelas. Akibat kurang memadainya spesifikasi maka dampak faktor yang tidak masuk ke dalam model akan terlihat pada pola residual. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2003).

Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji Durbin Watson atau *Durbin Watson Test*. Dimana apabila d_i dan d_u adalah batas bawah dan batas atas, statistik menjelaskan apabila nilai Durbin Watson berada pada $2 < DW < 4 - d_u$ maka dapat dinyatakan tidak terdapat autokorelasi atau *no-autocorrelation* (Ariefianto, 2012).

2. Heterokedastisitas

Asumsi penting (asumsi Gauss Markov) dalam penggunaan OLS adalah varians residual yang konstan. Varians dari residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual tidak berubah dengan berubahnya satu atau lebih variabel bebas. Jika asumsi ini terpenuhi, maka residual disebut homokedastis, jika tidak, disebut heterokedastis (Ariefianto, 2012).

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas dapat digunakan uji *white*. Secara manual uji ini dilakukan dengan melakukan regresi kuadrat dengan variabel bebas kuadrat dan perkalian variabel bebas. Nilai R^2 yang didapat digunakan untuk menghitung X^2 dimana $X^2 = n \cdot R^2$ (Gujarati, 2003). Dimana pengujiannya adalah jika nilai *Probability Observation R-Square* lebih besar dari taraf nyata 5 persen. Maka hipotesis alternatif adanya heterokedastisitas dalam model ditolak.

3. Multikolinearitas

Gujarati (2003) menyatakan bahwa multikolinearitas adalah fenomena sampling. Ia terjadi pada sampel dan bukan pada populasi. Hal ini tentu saja jika kita telah menspesifikasikan variabel yang masuk ke dalam model dengan benar (misalnya tidak ada variabel yang merupakan multiplikasi dari variabel lainnya). Dengan kata lain, jika dimungkinkan untuk bekerja pada populasi maka multikolinearitas tidak akan pernah menjadi suatu masalah (Ariefianto, 2012).

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penafsiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan *auxilliary regression* untuk mendeteksi adanya

multikolinearitas. Kriterianya adalah jika R^2 regresi persamaan utama lebih dari R^2 regresi *auxilliary* maka di dalam model tidak terjadi multikolinearitas. Model *auxilliary regression* adalah:

$$F_t \frac{R^2_{X1,X2,X3,\dots,Xk}/(k-2)}{1-R^2_{X1,X2,X3,\dots,Xk}/(N-K+1)} \dots \dots \dots (3-5)$$

d) Uji Hausman

Uji Hausman merupakan uji yang digunakan untuk menentukan model regresi pada data panel yaitu *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Maka akan dilakukan uji signifikan antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect* untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan. Uji Hausman dapat didefinisikan sebagai pengujian statistik untuk memilih apakah *Fixed Effect* atau *Random Effect* yang akan digunakan. Pengujian uji Hausman dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect Model*

H_a : *Fixed Effect Model*

Uji Hausman akan mengikuti distribusi chi-squares sebagai berikut:

$$m = q^{\wedge} Var (q^{\wedge}) - 1 q^{\wedge} \dots \dots \dots (3-6)$$

Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *chi-square* dengan *degree of freedom* sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya, maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect*. Sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka, model yang tepat adalah model *Random Effect*.

1. Model Efek Tetap (*Fixed Effects Model*, FEM)

Model *fixed effects* adalah model dengan *intercept* berbeda-beda untuk setiap subjek (*cross section*), tapi *slope* setiap subjek tidak berubah seiring waktu (Gujarati,2012). Model ini mengasumsikan bahwa *intercept* adalah berbeda setiap subjek sedangkan *slope* tetap sama antar subjek. Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy* (Kuncoro, 2012). Model ini sering disebut dengan model *Least Square Dummy Variables* (LSDV).

2. Model Efek Random (*Random Effect Models*, REM)

Random Effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek diasumsikan *random* yang dispesifikasikan dalam bentuk residual (Kuncoro, 2012). Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Menurut (Widarjono, 2009) model *random effect* digunakan untuk mengatasi kelemahan model *fixed effect* yang menggunakan variabel *dummy*. Metode analisis data panel dengan model *random effect* harus memenuhi persyaratan yaitu jumlah *cross section* harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

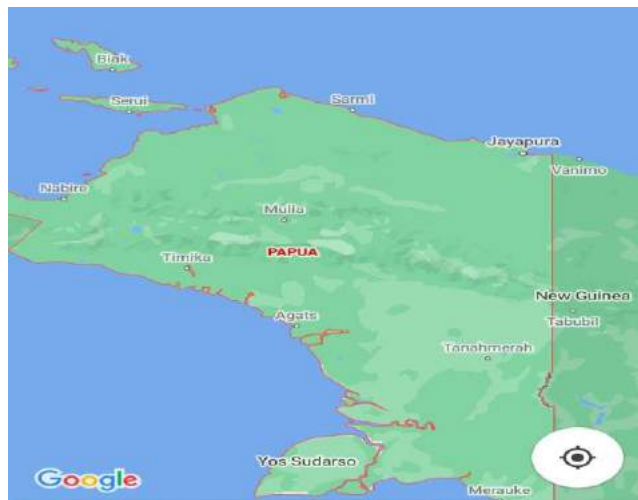
4.1.1 Provinsi Papua

A. Kondisi Geografis

Provinsi Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Papua juga dikenal akan keindahan alamnya, bahkan ada kondisi alam di tanah tersebut yang masih alami dan belum mendapatkan campur tangan manusia.

Papua sangat terkenal kaya akan sumber daya mineral logam baik tembaga, emas, dan perak. Sejumlah perusahaan tambang raksasa melakukan eksplorasi di Papua baik di wilayah Indonesia.

Gambar 4.1 Peta Wilayah Provinsi Papua



Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia, yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua. Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Secara astronomis, Pulau Papua terletak di posisi 130° - 141° Bujur Timur dan 2° 25' Lintang Utara sampai 9° Lintang Selatan. Provinsi Papua yang memiliki luas $312.224,37 \text{ km}^2$ ini didiami ratusan suku bangsa.

Batas wilayah Papua dapat dilihat sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Papua New Guinea
Sebelah Utara	: Samudera Pasifik
Sebelah Barat	: Provinsi Papua Barat
Sebelah Selatan	: Laut Arafura.

B. Topografi

Pegunungan Utama di Provinsi Papua terdiri atas Pegunungan Kobowre di Nabire, Pegunungan Sudirman di Enarotali dan Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya di Jayawijaya, Pegunungan Vanres di Mamberamo, Pegunungan Gauntier dan Pegunungan Wisnumurti. Gunung dan Puncak di Provinsi

Papua yang berada di deretan pegunungan tersebut adalah: Gunung Waspada (1.070 m); Puncak Jaya (5.030 m), Puncak Trikora (4.750 m), Puncak Yamin (4.350 m), Puncak Mandala (4.700 m), Gunung Dom (1.332 m). Pegunungan Jayawijaya merupakan suatu perluasan cordillera yang mengubah dataran tinggi Papua yang berpusat New Guinea, membentang sepanjang 400 mil (640 km) dari timur ke barat menyeberangi bagian tengah Papua dengan puncak tertingginya adalah Puncak Jaya 16,502 kaki (5,030 meter). Puncak dengan hutan lebat, kecuali salah satu puncak tertinggi yang terdiri dari batu karang glaciated. Di bagian utara terdapat lembah yang dialiri sungai Tariku Dan Taritatu Sungai dan merupakan anak sungai Mamberamo Sungai. Kebanyakan dataran rendah di semenanjung. Bomberai berjejer kearah barat sedangkan di Doberai yang bergunung-gunung (Vogelkop; Belanda, "Kepala Burung") berjejer kearah barat laut.

Sepanjang bagian selatan pegunungan Maoke terdapat suatu area berpaya-paya yang luas [yang] yang dialiri oleh air dari sungai Digul, Pulau, Braza, Baliem, Loren, Armandville, Blumen, Semara, dan Mapi Sungai. Daerah Gunung yang tinggi ditutupi oleh lembah-lembah yang ditumbuhi rumput kasar, dan tumbuh-tumbuhan hutan-hujan tropis. Sedangkan area utara pegunungan tengah ditutupi oleh hutan basah. Di antaranya banyak ditumbuhi varieta pohon palem (sagu, kelapa, dan nipa), kayu cendana, kayu hitam, karet, casuarina, pohon cedar, buah sukun, dan bakau; anggrek dan pakis tumbuh dengan subur di hutan basah tersebut. Kehidupan rimba meliputi binatang berkantung, monotremes (binatang menyusui), ular, buaya, katup/kupu-kupu, burung kasuari, cenderawasih, trenggiling, anjing liar, babi

liar, kura-kura darat, kadal kanguru pohon, burung bangau, merpati hijau, dan berbagai jenis burung lainnya.

Sebagian besar wilayah Papua memiliki kelas lereng > 40% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga, dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi disamping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Karakteristik bencana yang ada di wilayah ini yaitu gempa dan tsunami. Kawasan rawan bencana alam ini meliputi kawasan rawan gempa dan tsunami yang terletak di daerah pesisir maupun daratan. Umumnya daerah patahan aktif Sesar Sorong merupakan zona yang sangat rawan gempa bumi. Wilayah Manokwari merupakan daerah yang paling rawan gempa. Akan tetapi, secara umum wilayah ini rawan terhadap gempa bumi.

C. Iklim

Provinsi Papua merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selama tahun 2019, curah hujan terendah tercatat 1.800 mm dan yang tertinggi tercatat 3.000 mm. Kelembapan udara di Papua relatif tinggi. Pada tahun 2019, rata-rata kelembapan udara berkisar 80 persen. Sementara rata-rata tekanan udara maksimum antara 1.008,90 mb sampai 1.018 mb. Adapun rata-rata penyinaran matahari dalam kisaran 43 persen sampai 70 persen. Kemudian suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya

tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara rata-rata di wilayah Papua pada tahun 2019 berkisar 19° C sampai 28° C. Selama tahun 2019, Papua mengalami gempa bumi setiap bulannya. Jumlah gempa bumi di Papua selama tahun 2019 sebanyak 58 kali, lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Pemerintahan

Tabel 4.1

Luas Wilayah dan Persentase Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Provinsi (%)
Merauke	46 430,54	14,87
Jayawijaya	2 634,67	0,84
Jayapura	13 950,83	4,47
Nabire	10 617,45	3,40
Kepulauan Yapen	2 434,95	0,78
Biak Numfor	2 240,18	0,72
Paniai	4 904,27	1,57
Puncak Jaya	5 014,26	1,61
Mimika	18 955,02	6,07
Boven Digoel	23 761,54	7,61
Mappi	22 515,38	7,21
Asmat	25 915,62	8,30
Yahukimo	15 227,18	4,88
Pegunungan Bintang	14 916,02	4,78
Tolikara	3 664,81	1,17
Sarmi	12 894,93	4,13

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Provinsi (%)
Keerom	8 401,18	2,69
Waropen	7 246,42	2,32
Supiori	691,67	0,22
Mamberamo Raya	29 058,31	9,31
Nduga	5 203,23	1,67
Lanny Jaya	2 845,00	0,91
Mamberamo Tengah	4 150,12	1,33
Yalimo	3 639,80	1,17
Puncak	5 014,26	1,61
Dogiyai	6 137,04	1,97
Intan Jaya	9 879,20	3,16
Deiyai	3 070,20	0,98
Kota Jayapura	810,29	0,26
Provinsi Papua	312 224,37	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua

Secara administratif, provinsi Papua memiliki 28 kabupaten dan satu kota. Ibu kota Provinsi ini terletak di Jayapura. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, kabupaten Merauke menduduki peringkat pertama dengan luas wilayah tersebar, yaitu 46.430,54 km² atau sekitar 14,87 persen. Kemudian kabupaten Mamberamo Raya menduduki peringkat kedua dengan luas wilayah sebesar 29.058,31km²atau 9,31 persen dan terakhir disusul oleh kabupaten Asmat dengan luas wilayah sebesar 25.915,62km² atau 8,30 persen. Sedangkan untuk luas wilayah yang terkecil, di duduki oleh Kabupaten Supiori dengan luas wilayah sebesar 691,67km² atau 0,22 persen.

E. Demografi

1. Jumlah Penduduk Provinsi Papua

Jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan akan semakin meningkatkan kepadatan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena peningkatan penduduk juga dapat menjadi penghambat bagi tingkat PDRB apabila terus dibarengi dengan faktor-faktor produksi lainnya. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan akan semakin meningkatkan kepadatan penduduk. Di Provinsi ini didominasi oleh suku Asmat, Ansus, Amungme, Bauzi, Biak, dan lain-lain dan penduduknya mayoritas beragama Kristen.

Tabel 4.2

Jumlah Penduduk Provinsi Papua Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Merauke	116 385	112 296	228 681
Jayawijaya	111 811	108 301	220 112
Jayapura	70 206	63 974	134 180
Nabire	79 909	72 912	152 821
Kepulauan Yapen	53 485	49 828	103 313
Biak Numfor	79 886	75 618	155 504
Paniai	93 079	87 423	180 502
Puncak Jaya	76 098	57 614	133 712
Mimika	123 819	99 786	223 605
Boven Digoel	39 285	32 837	72 122
Mappi	56 471	52 443	108 914
Asmat	48 413	50 472	98 885
Yahukimo	97 192	95 435	192 627
Pegunungan Bintang	40 312	36 274	76 586

Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Tolikara	75 207	65 206	140 413
Sarmi	22 786	18 493	41 279
Keerom	31 114	26 789	57 903
Waropen	17 322	14 778	32 100
Supiori	11 408	9 780	21 188
Mamberamo Raya	13 115	11 658	24 773
Nduga	54 593	45 224	99 817
Lanny Jaya	95 474	84 831	180 305
Mamberamo Tengah	25 602	23 209	48 811
Yalimo	34 221	29 568	63 789
Puncak	59 610	55 713	115 323
Dogiyai	49 891	49 386	99 277
Intan Jaya	25 214	25 385	50 599
Deiyai	37 818	36 711	74 529
Kota Jayapura	162 487	141 273	303 760
Provinsi Papua	1 802 213	1 633 217	3 435 430

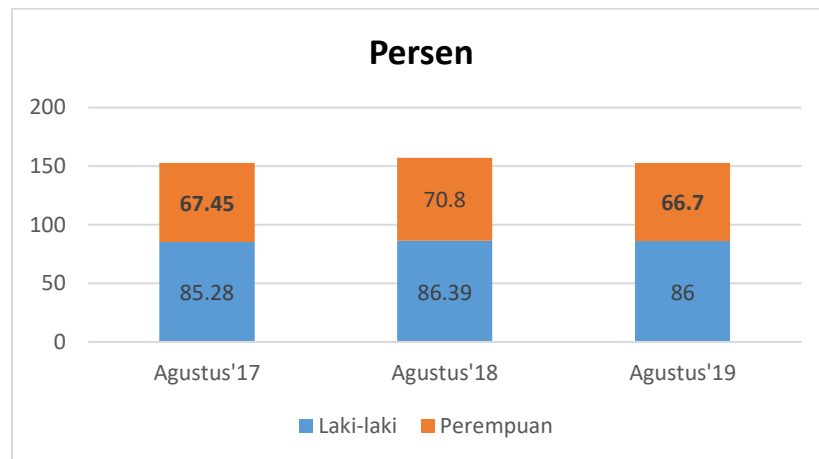
Sumber: www.papua.bps.go.id (data diolah)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbesar di Provinsi Papua adalah di Kota Jayapura dengan jumlah penduduk sebanyak 303.760 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 162.487 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 141.273 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kota Jayapura sangat potensial baik darisisi geografis dan aksesibilitas yang cukup strategis yang mengelilingi Provinsi Papua dan juga sebagai ibukota Provinsi Papua itu sendiri. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kabupaten Supiori dengan jumlah penduduk sebanyak 21.188 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11.408 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 9.780 jiwa.

2. Tenaga Kerja Provinsi Papua

Grafik 4.1

**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua
Agustus 2017 – Agustus 2019**



Sumber: www.papua.bps.go.id (data diolah)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Sektor pertanian masih menjadi sumber utama mata pencaharian penduduk Provinsi Papua. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK dihitung dengan menyatakan jumlah orang dalam angkatan kerja sebagai persentase dari penduduk usia kerja. Angkatan kerja adalah jumlah orang yang bekerja ditambah jumlah pengangguran. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang ditentukan untuk mengukur karakteristik ekonomi.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2017 TPAK yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 85,28 persen dan TPAK berjenis

kelamin perempuan sebesar 67,45 persen. Kemudian pada Agustus 2018 TPAK yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 86,39persen dan TPAKberjenis kelamin perempuan sebesar 70,80. Dalam hal ini terjadi peningkatan sebesar 1,11 persen TPAK laki-laki dan 3,35 persen untuk TPAK perempuan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Kemudian TPAK laki-laki menurun dari 86,39 persen pada Agustus 2018 menjadi 86 persen pada Agusutsu 2019. Hal yang sama terjadi dengan TPAK perempuan yang menurun dari 70,80 persen pada Agustus 2018 menjadi 66,70 persen pada Agustus 2019.

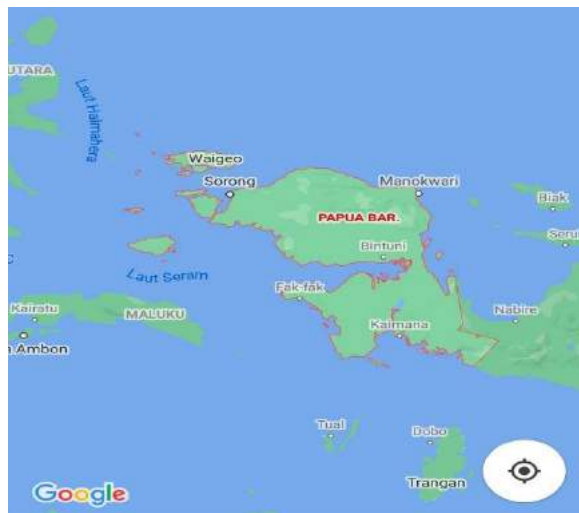
4.1.2 Provinsi Papua Barat

A. Kondisi Geografis

Belakangan Indonesia membagi wilayahnya di pulau ini menjadi dua provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Provinsi Papua Barat awalnya bernama Irian Jaya Barat, berdiri berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tanggal 4 Oktober 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tersebut mendapat dukungan dari SK DPRD Provinsi Irian Jaya Nomor 10 Tahun 1999 tentang pemekaran Provinsi Irian Jaya menjadi tiga provinsi. Setelah diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1999 oleh Presiden B.J. Habibie, rencana pemekaran provinsi menjadi tiga ditolak warga Papua di Jayapura dengan demonstrasi akbar pada tanggal 14 Oktober 1999. Sejak saat itu pemekaran provinsi ditangguhkan, sementara pemekaran kabupaten tetap dilaksanakan sesuai UU Nomor 45 Tahun 1999.

Berdasarkan Inpres Nomor I Tahun 2003, pemekaran Irian Jaya Barat kembali diaktifkan dan Provinsi Irian Jaya Barat perlahan membentuk dirinya menjadi provinsi definitif. Provinsi Irian Jaya Barat mendapat tekanan keras dari induknya Provinsi Papua, hingga ke Mahkamah Konstitusi melalui uji materiil. Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan UU Nomor 45 Tahun 1999 yang menjadi payung hukum Provinsi Irian Jaya Barat. Namun Provinsi Irian Jaya Barat tetap diakui keberadaannya dan sejak tanggal 18 April 2007 berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 2007. Meskipun Provinsi Papua Barat telah dijadikan provinsi tersendiri, namun tetap mendapat perlakuan khusus sebagaimana provinsi induknya. Provinsi ini juga telah mempunyai KPUD sendiri dan menyelenggarakan pemilu untuk pertama kalinya pada tanggal 5 April 2004.

Gambar 4.2 Peta Wilayah Provinsi Papua Barat



Provinsi Papua Barat secara astronomis terletak pada 24° - 132° Bujur Timur dan 0° - 4° Lintang Selatan, tepat berada di bawah garis khatulistiwa

dengan ketinggian 0-100 meter dari permukaan laut. Provinsi Papua Barat memiliki luas 102.955,15 km²; ini didiami ratusan suku bangsa.

Batas wilayah Papua dapat dilihat sebagai berikut:

Sebelah Timur	: Provinsi Papua
Sebelah Utara	: Samudera Pasifik
Sebelah Barat	: Provinsi Maluku Utara, Kepulauan Maluku
Sebelah Selatan	: Laut Banda

B. Topografi

Provinsi Papua Barat terletak di belahan barat Pulau Papua, mulai dari bagian leher kepala burung hingga pesisir barat. Daerah ini juga menjadi pintu masuk arus lintas Indonesia bagian timur laut, yang mengalir dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia.

Daerah Kepala Burung umumnya terdiri dari beberapa deret pegunungan tinggi antara lain Pegunungan Arfak dan Pegunungan Tamrau, dengan puncaknya mencapai 3.000 m atau lebih. Daerah sekitar Teluk Berau dan daerah di sebelah barat Teluk Arguni adalah dataran rendah yang penuh dengan rawa-rawa dan sungai-sungai yang mengalir dari Pegunungan di daerah Daerah Pegunungan Tengah hingga Pantai Utara dapat dibagi ke dalam empat bagian yang membujur dari barat ke timur, yakni daerah pegunungan Jayawijaya, daerah Danau-danau tengah; daerah Pegunungan Tengah, dan daerah tanah rendah di bagian Utara Papua. Puncak pegunungan mencapai lebih 5.000 meter yang diliputi salju dan dari Pegunungan Tengali ini mengalir sungai-sungai besar-kecil dari lereng sebelah selatan dan utara

antara lain anak-anak sungai Mamberamo. Daerah Pegunungan Utara adalah beberapa deret pegunungan yang lebih rendah daripada Pegunungan Jayawijaya. Dataran rendah bagian utara merupakan daerah panjang yang berawa-rawa, dengan pantai pasirnya yang makin ke arah timur berubah menjadi pantai karang. Daerah Sebelah Selatan Pegunungan Jayawijaya adalah suatu dataran rendah yang sangat luas di sebelah timur adalah daerah dengan berpuluh sungai besar dan kecil, berasal dari Pegunungan Jayawijaya. Dua sungai yang terbesar di antaranya adalah Sungai Eilanden dan Sungai Digul. Sebagian besar daerah dataran rendah terdiri dari rawa-rawa yang luas, dengan muara-muara sungai yang berlumpur. Sebaliknya di sebelah selatan daerah Sungai Digul terdapat Sabana yang luas.

Sebagian besar wilayah Papua Barat memiliki kelas lereng > 40% dengan bentuk wilayah berupa perbukitan. Kondisi tersebut menjadi kendala utama bagi pemanfaatan lahan baik untuk pengembangan sarana dan prasarana fisik, sistem transportasi darat maupun bagi pengembangan budidaya pertanian terutama untuk tanaman pangan. Sehingga, dominasi pemanfaatan lahan diarahkan pada hutan konservasi disamping untuk mencegah terjadinya bahaya erosi dan longsor. Karakteristik bencana yang ada di wilayah ini yaitu gempa dan tsunami. Kawasan rawan bencana alam ini meliputi kawasan rawan gempa dan tsunami yang terletak di daerah pesisir maupun daratan. Umumnya daerah patahan aktif Sesar Sorong merupakan zona yang sangat rawan gempa bumi. Wilayah Manokwari merupakan daerah yang paling rawan gempa. Akan tetapi, secara umum wilayah ini rawan terhadap gempa bumi.

C. Iklim

Papua merupakan daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Selama tahun 2019, curah hujan terendah tercatat 1.562 mm dan yang tertinggi tercatat 5.413 mm. Kelembapan udara di Papua relatif tinggi. Pada tahun 2019, rata-rata kelembapan udara berkisar antara 73 persen yang tercatat sampai 86,8 persen. Sementara rata-rata tekanan udara maksimum antara 1.008,90 mb sampai 1.018 mb. Adapun rata-rata penyinaran matahari dalam kisaran 43 persen sampai 70 persen. Kemudian suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Suhu udara rata-rata di wilayah Papua pada tahun 2019 berkisar 18,7° C sampai 28° C. Selama tahun 2019, Papua mengalami gempa bumi setiap bulannya. Jumlah gempa bumi di Papua selama tahun 2019 sebanyak 58 kali, lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

D. Pemerintahan

Tabel 4.3

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Provinsi (%)
Fakfak	14320,00	13,91
Kaimana	16241,84	15,78
Teluk Wondama	3950,53	3,84
Teluk Bintuni	20840,83	20,24
Manokwari	3186,28	3,10
Sorong	6544,23	6,36

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Provinsi (%)
Raja Ampat	8034,44	7,80
Tambrauw	11 529,18	11,20
Maybrat	5461,69	5,31
Manokwari Selatan	2812,44	2,73
Pegunungan Arfak	2773,74	2,69
Kota Sorong	656,64	0,64
Papua Barat	102946,15	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Papua Barat

Secara administratif, Provinsi Papua Barat terdiri atas tiga belas daerah otonom kabupaten dan kota. Ibu kota provinsi ini terletak di Manokwari. Daerah Otonom dengan luas terbesar adalah Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas wilayah lebih kurang 20.840,83km² atau 20,24 persen. dan terkecil adalah Kota Sorong dengan luas 656,64 km² atau 0,64 persen.

E. Demografi

A. Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat

Jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan akan semakin meningkatkan ke padatan penduduk. Pertumbuhan penduduk dapat mendorong angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena peningkatan penduduk juga dapat menjadi penghambat bagi tingkat PDRB apabila terus dibarengi dengan faktor-faktor produksi lainnya. Jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan pertumbuhan akan semakin meningkatkan kepadatan penduduk. . Di Provinsi ini di dominasi oleh suku

Asmat, Ansus, Amungme, Bauzi, Biak, dan lain-lain dan penduduknya mayoritas beragama Kristen.

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Provinsi Papua Barat Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020

Kabupaten	Jumlah Penduduk Proyeksi Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Fakfak	42 083	37 787	79 870
Kaimana	32 931	28 889	61 820
Teluk Wondama	17 822	15 412	33 234
Teluk Bintuni	36 189	29 516	65 705
Manokwari	95 007	84 377	179 384
Sorong Selatan	25 005	22 870	47 875
Sorong	48 104	43 030	91 134
Raja Ampat	26 001	23 082	49 083
Tambrau	7 178	6 843	14 021
Maybrat	21 234	20 564	41 798
Manokwari Selatan	12 775	11 904	24 679
Pegunungan Arfak	15 784	16 009	31 793
Kota Sorong	136 129	125 297	261 426
Papua Barat	516.242	465.580	981.822

Sumber: www.papuabarat.bps.go.id (data)

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbesar di Provinsi Papua Barat adalah di Kota Sorong dengan jumlah penduduk sebanyak 261.426 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 136.129 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 125.297 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kota Sorong menyimpan kekayaan hasil tambang dan sebagai daerah penghasil Gas. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kabupaten Manokwari Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 24.679 jiwa,

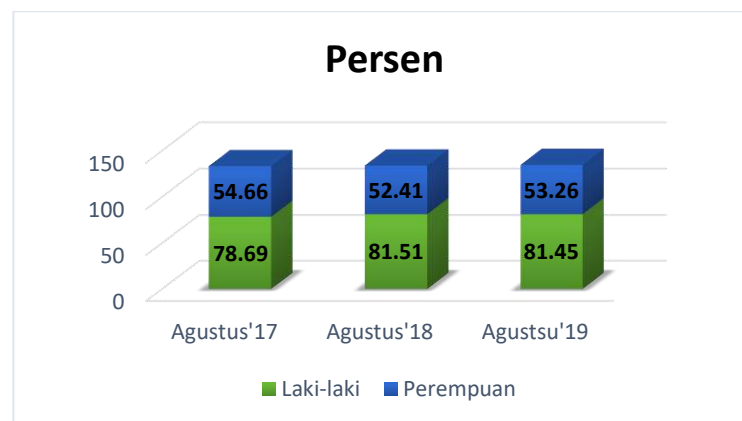
dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 12.775 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 11.904 jiwa.

2. Tenaga Kerja Provinsi Papua Barat

Grafik 4.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Papua Barat

Agustus 2017 – Agustus 2019



Sumber: www.papuabarat.bps.go.id (data diolah)

Di Papua Barat, TPAK laki-laki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan TPAK perempuan. Pada Agustus 2017 TPAK laki-laki mencapai 78,79 persen sementara perempuan hanya 54,66 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 79 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya sekitar 55 orang yang termasuk angkatan kerja. Kemudian pada Agustus 2018 TPAK laki-laki mencapai 81,51 persen sementara pada perempuan hanya 52,41 persen. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 82 orang, sementara pada perempuan dari

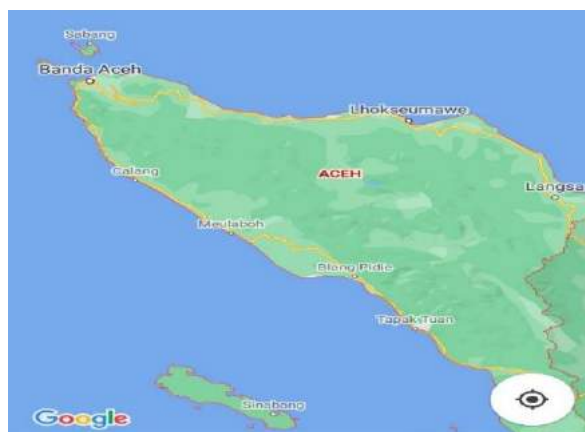
100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya sekitar 53 orang yang termasuk angkatan kerja. Kemudian pada Agustus 2019 TPAK laki-laki mencapai 81,45 persen sementara pada perempuan hanya 53,26 persen. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa dari 100 orang penduduk usia kerja laki-laki, yang termasuk angkatan kerja sekitar 82 orang, sementara pada perempuan dari 100 orang penduduk usia kerja perempuan hanya sekitar 53 orang yang termasuk angkatan kerja.

4.1.3 Provinsi Aceh

A. Kondisi Geografis

Secara astronomis Indonesia terletak antara $6^{\circ} 45'$ – $141^{\circ} 05'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0° . Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.

Gambar 4.3 Peta Wilayah Provinsi Aceh



Provinsi Aceh terletak di bagian barat Indonesia tepatnya ujung Barat Laut Sumatera ($2^{\circ}00'00''$ - $6^{\circ}04'30''$ Lintang Utara dan $94^{\circ}58'34''$ - $98^{\circ}15'03''$ Bujur Timur) dengan Ibu kota Banda Aceh, memiliki luas wilayah 57.956 km^2 . Provinsi Aceh memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan Nasional dan Internasional yang menghubungkan belahan dunia timur dan barat dengan batas wilayahnya :

Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Teluk Benggala

Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara dan Samudera Hindia

Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia

Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatera Utara.

Satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Provinsi Sumatera Utara, sehingga memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Aceh dikelilingi dengan suaka cagar alamnya, lokasi suaka alam/objek wisata alam di Provinsi Aceh ada di sembilan lokasi, yaitu Taman Buru Linge Isaq, Cagar Alam Serbajadi, Taman Nasional Gunung Leuser, Taman Wisata dan Taman Laut Pulau Weh Sabang, Cagar Alam Jantho, Hutan untuk Latihan Gajah (PLG), Taman Wisata Laut Kepulauan Banyak, dan Suaka Margasatwa Rawa Singkil.

B. Topografi

Provinsi Aceh memiliki topografi datar hingga bergunung. Wilayah dengan topografi daerah datar dan landai sekitar 32 persen dari luas wilayah, sedangkan berbukit hingga bergunung mencapai sekitar 68 persen dari luas

wilayah. Daerah dengan topografi bergunung terdapat dibagian tengah Aceh yang merupakan gugusan pegunungan bukit barisan dan daerah dengan topografi berbukit dan landai terdapat dibagian utara dan timur Aceh. Berdasarkan kelas topografi wilayah Provinsi Aceh yang memiliki topografi datar (0 - 2%) tersebar di sepanjang pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 24,83 persen dari total wilayah; landai (2 – 15%) tersebar di antara pegunungan Seulawah dengan Sungai Krueng Aceh, di bagian pantai barat – selatan dan pantai utara – timur sebesar 11,29 persen dari total wilayah; agak curam (15 -40%) sebesar 25,82 persen dan sangat curam (> 40%) yang merupakan punggung pegunungan Seulawah, gunung Leuser, dan bahu dari sungai-sungai yang ada sebesar 38,06 persen dari total wilayah.

Provinsi Aceh memiliki ketinggian rata-rata 125 m diatas permukaan laut. Persentase wilayah berdasarkan ketinggiannya yaitu: (1) Daerah berketinggian 0-25 m dpl merupakan 22,62 persen luas wilayah (1,283,877.27 ha), (2) Daerah berketinggian 25-1.000 m dpl sebesar 54,22 persen luas wilayah (3,077,445.87 ha), dan (3) Daerah berketinggian di atas 1.000 m dpl sebesar 23,16 persen luas wilayah (1,314,526.86 ha).

C. Iklim

Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis khatulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada tahun 2015, rata-rata tekanan udara sekitar 1.010,70 mb dan rata-rata peninaran matahari berada di kisaran 65,69 persen. Pada Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata pada Maret 2019 sebesar 26,90 °C. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami

fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara benua Australia. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari massa udara daratan Asia dan Samudra Pasifik. Aceh memiliki curah hujan yang bervariasi berkisar antara 87,43 mm pada bulan Maret 2019.

D. Pemerintahan

Tabel 4.5

Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Provinsi (%)
Simeulue	2 051,48	3,54
Aceh Singkil	2 185,00	3,77
Aceh Selatan	3 841,60	6,63
Aceh Tenggara	4 231,43	7,30
Aceh Timur	6 286,01	10,85
Aceh Tengah	4 318,39	7,45
Aceh Barat	2 927,95	5,05
Aceh Besar	2 969,00	5,12
Pidie	3 086,95	5,33
Bireuen	1 901,20	3,28
Aceh Utara	3 236,86	5,59
Aceh Barat Daya	1 490,60	2,57
Gayo Lues	5 719,58	9,87
Aceh Tamiang	1 956,72	3,38
Nagan Raya	3 363,72	5,80
Aceh Jaya	3 812,99	6,58

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km²)	Persentase Luas Provinsi (%)
Bener Meriah	1 454,09	2,51
Pidie Jaya	1 073,60	1,85
Kota Banda Aceh	61,36	0,11
Kota Sabang	153,00	0,26
Kota Langsa	262,41	0,45
Kota Lhokseumawe	181,06	0,31
Kota Subulussalam	1 391,00	2,40
Aceh	57 956,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

Secara administratif pada tahun, Provinsi Aceh memiliki 23 kabupaten/kota, 289 kecamatan, dan 6.516 desa. Ibu kota Provinsi ini berada di Kota Banda Aceh. Berdasarkan luas daerah menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, kabupaten Aceh Timur menduduki peringkat pertama dengan luas wilayah terbesar, yaitu 6.286,01km² atau sekitar 10,85 persen. Kemudian kabupaten Gayo Lues menduduki peringkat kedua dengan luas wilayah sebesar 5.719,58km² atau 9,87 persen dan terakhir disusul oleh kabupaten Aceh Tengah dengan luas wilayah sebesar 4.318,39km² atau 7,45 persen. Sedangkan untuk luas wilayah yang terkecil, di duduki oleh Kota Banda Aceh dengan luas wilayah sebesar 61,36 km² atau 0,11 persen.

E. Demografi

1. Jumlah Penduduk Provinsi Aceh

Tabel 4.6

Jumlah Penduduk Provinsi Aceh Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Proyeksi Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Simeulue	48 200	45 790	93 990
Aceh Singkil	63 906	62 606	126 512
Aceh Selatan	118 526	122 294	240 820
Aceh Tenggara	109 981	110 421	220 402
Aceh Timur	222 489	222 340	444 829
Aceh Tengah	109 389	106 979	216 368
Aceh Barat	108 484	105 513	213 997
Aceh Besar	222 401	211 127	433 528
Pidie	218 300	232 465	450 765
Bireuen	235 188	245 134	480 322
Aceh Utara	309 780	317 485	627 265
Aceh Barat Daya	75 826	76 657	152 483
Gayo Lues	47 514	48 215	95 729
Aceh Tamiang	150 694	147 892	298 586
Nagan Raya	86 033	84 065	170 098
Aceh Jaya	49 028	45 463	94 491
Bener Meriah	76 520	74 383	150 903
Pidie Jaya	80 195	84 116	164 311
Kota Banda Aceh	142 183	134 121	276 304
Kota Sabang	17 829	17 569	35 398

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Proyeksi Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Total
Kota Langsa	88 898	90 379	179 277
Kota Lhokseumawe	105 276	105 847	211 123
Kota Subulussalam	41 594	40 796	82 390
Aceh	2 728 234	2 731 657	5 459 891

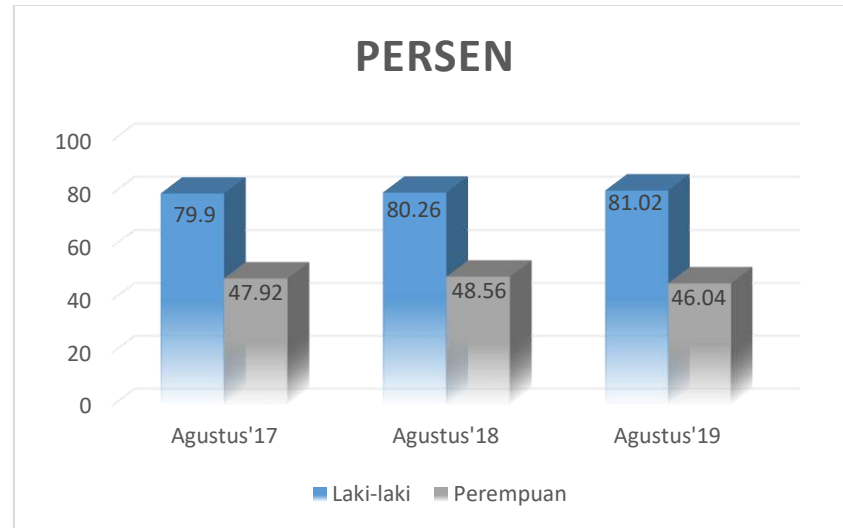
Sumber: www.aceh.bps.go.id

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk terbesar di Provinsi Aceh adalah di Kabupaten Bireuen dengan jumlah penduduk sebanyak 480.322 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 235.188 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 245.134 jiwa. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Bireuen sangat potensial baik dari sisi geografis dan aksesibilitas yang cukup strategis yang mengelilingi Provinsi Aceh dan juga merupakan daerah yang terkenal dengan makanan tradisionalnya seperti emping dan keripik pisang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit yaitu berada di Kota Sabang dengan jumlah penduduk sebanyak 35.398 jiwa, dengan rincian penduduk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17.829 jiwa dan penduduk yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 17.569 jiwa.

2. Tenaga Kerja Provinsi Aceh

Grafik 4.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Aceh Februari 2018 – Februari 2019 (persen)



Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh (data diolah)

Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya pasokan tenaga kerja yang tersedia. Pada Agustus 2019 TPAK tercatat sebesar 63,36 persen. Jika dilihat menurut jenis kelamin, TPAK perempuan masih lebih kecil daripada TPAK laki-laki, yaitu masing-masing sebesar 46,04 persen dan 81,02 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat peningkatan untuk TPAK laki-laki sebesar 0,94persen sedangkan TPAK perempuan mengalami penurunan sebesar 2,52 persen.

4.2 Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus di Tiga Provinsi

Penerima Dana Otonomi Khusus

4.2.1. Analisis Penerimaan Dana Otonomi Khusus.

Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang-undang.

Pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus atau Otsus untuk Provinsi Papua dan Papua Barat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 7,6 triliun. Sesuai dengan UU Otsus Nomor 21 tahun 2001 bahwa dana Otsus setara 2% dari total pagu dana alokasi umum (DAU) nasional dan berlaku selama 20 tahun. Dana otonomi khusus (otsus) yang dialokasikan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat belum mampu meningkatkan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Tercatat total yang dicairkan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 126,99 triliun. Fokus penggunaannya untuk mendukung perbaikan kesehatan dan pendidikan, yang pembiayaannya masing-masing minimal 30 persen dan 15 persen di Papua dan Papua Barat.

Disamping itu dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus kepada Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan dana tambahan infrastruktur. Besarnya dana otonomi khusus yang digelontorkan untuk Provinsi Papua dan

Papua Barat dari tahun 2002 sampai tahun 2020 sebesar Rp 126,99 triliun. Dimana total Dana Provinsi Papua sudah menerima total Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 93,05 triliun mulai tahun 2009 sampai tahun 2020. Sedangkan untuk Provinsi Papua barat sudah menerima total Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 33,94 triliun.

Tabel 4.7
Penerimaan Dana Otonomi Khusus (triliun rupiah) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2009-2020

Tahun	Papua	Papua Barat	Aceh
2009	4	1,7	3,73
2010	3,5	1,8	3,85
2011	4	2	4,51
2012	4,4	2,1	5,48
2013	5	2,3	6,22
2014	6,7	2,6	6,82
2015	7,2	2,9	7,06
2016	7,4	3,2	7,71
2017	8,2	3,3	7,97
2018	8	3	8,03
2019	8,7	4	8,36
2020	8	4	8,34

Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah)

Pemerintah Provinsi Aceh juga mengalokasikan dana otonomi khusus untuk Provinsi Aceh yang dilaksanakan mulai tahun 2008, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana otsus tersebut

dialokasikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas, yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh, besarnya setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional, dan ditujukan untuk membantu daerah dalam rangka membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, kesehatan dan sosial.

Pemerintah Aceh perlu memperbaiki perencanaan dan penganggaran untuk proyek pembangunan infrastruktur. Penganggaran tidak hanya untuk pembangunan, tetapi juga dialokasikan untuk pemeliharaan. Beberapa kasus infrastruktur sudah terbangun di kabupaten/kota, tetapi terbengkalai karena tidak tersedia anggaran pemeliharaan, seperti gedung olah raga di Kota Subulussalam dan Islamic Center di Kabupaten Aceh Singkil, padahal kedua infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi penyumbang tambahan pendapatan bagi kabupaten/kota.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh berhak menerima alokasi Dana Otonomi Khusus. Penerimaan Dana Otonomi Khusus 2008-2020 telah mencapai angka Rp 88,7 triliun. Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh dari Pemerintah Pusat mengalami kenaikan setiap tahun. Provinsi Aceh memperoleh Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 3,59 triliun tahun 2008, kemudian meningkat terus sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 8,4 triliun. Penerimaan Dana Otonomi Khusus Aceh meningkat secara bertahap

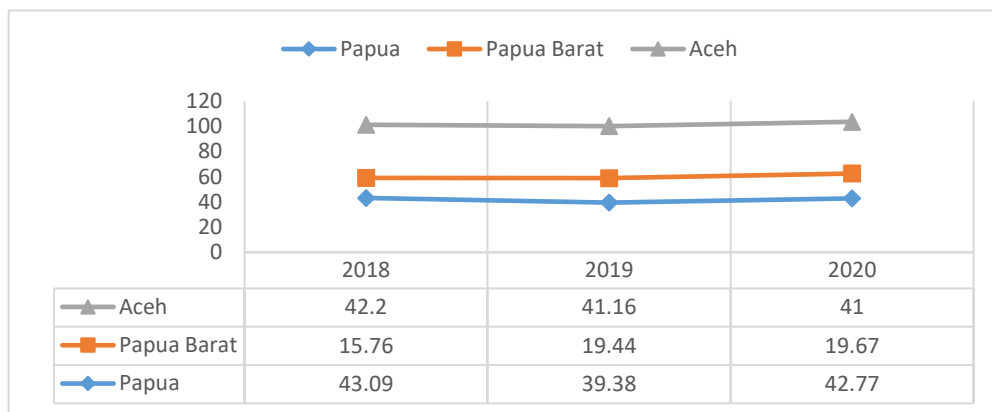
sesuai dengan kenaikan DAU nasional. Peningkatan DAU nasional bergantung pada kenaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

4.2.2 Kontribusi dan Pertumbuhan Dana Otonomi Khusus

Diperoleh besarnya kontribusi dan pertumbuhan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat dan Aceh terhadap Dana Otonomi Khusus di Indonesia seperti dilihat pada grafik dibawah ini.

Grafik 4.4

Kontribusi Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh (persen)



Sumber: www.kemenkeu.go.id(data diolah)

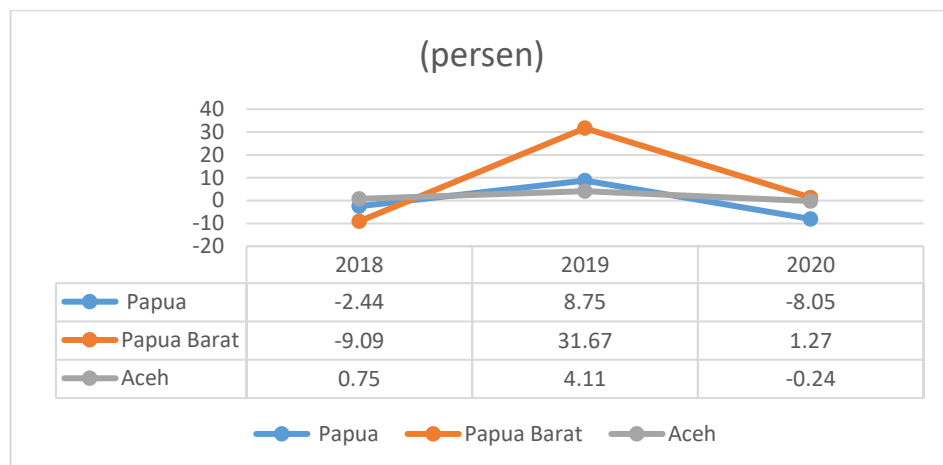
Pada grafik diatas terlihat bahwa kontribusi Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua tahun 2018 – 2020 berfluktuasi. Pada tahun 2018 kontribusi dana otonomi khusus Provinsi Papua sebesar 43,09 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,71 persen menjadi 39,38 persen, namun pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan sebesar 3,39 persen menjadi 42,77 persen.

Namun di Provinsi Papua Barat, kontribusi dana otonomi khusus pada tahun 2018 – 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 kontribusi dana otonomi khusus sebesar 15,76 persen, kemudian meningkat sebesar 3,68 persen menjadi 19,44 persen pada tahun 2019, tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar 0,23 persen menjadi 19,67 persen.

Di Provinsi Aceh, kontribusi Dana Otonomi Khusus mengalami kenaikan dari tahun 2018 - 2020. Pada tahun 2018, kontribusi dana otonomi khusus di Provinsi Aceh sebesar 42,20 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 1,04 persen menjadi 41,16 persen. Dan di tahun 2020 juga mengalami penurunan sebesar 0,16 persen menjadi 41 persen.

Grafik 4.5

Pertumbuhan Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2018-2020



Sumber: www.kemenkeu.go.id (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh tahun 2018 – 2020 berfluktuasi. Di Provinsi Papua, pertumbuhan dana otonomi khusus pada tahun 2018 sebesar - 2,44 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 8,75

persen, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 8,05 persen.

Di Provinsi Papua Barat, pertumbuhan dana otonomi khusus pada tahun 2018 – 2020 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 kontribusi dana otonomi khusus sebesar -9,09 persen, kemudian meningkat menjadi 31,67 persen pada tahun 2019, namun tahun 2020 pertumbuhan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh mengalami penurunan menjadi 1,27 persen.

Di Provinsi Aceh pertumbuhan Dana Otonomi Khusus mengalami penurunan dari tahun 2018 - 2020. Pada tahun 2018, pertumbuhan dana otonomi khusus di Provinsi Aceh sebesar 0,75 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4,11 persen. Namun di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,24 persen.

4.3 Analisis Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Pada Tiga

Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus.

Tabel 4.8

Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh

Indikator	Papua		Papua Barat		Aceh	
	2009	2019	2009	2019	2009	2019
Sosial						
IPM	63,41	60,84	68,58	64,70	70,53	71,9
Gini Rasio	0,38	0,41	0,35	0,42	0,30	0,32
Persentase Penduduk Miskin (%)	37,53	26,55	35,71	21,51	21,80	15,01

Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,57	6,65	8,01	7,60	8,63	9,18
Angka Harapan Hidup (tahun)	68,35	65,65	68,20	66,02	68,60	69,87
Ekonomi						
PDRB (triliun rupiah)	23,14	134,56	7,29	62,07	32,22	132,09
PDRB perkapita (juta rupiah)	8,53	39,85	9,87	64,68	7,48	24,59
Pertumbuhan Ekonomi (%)	24,99	-15,72	23,98	2,66	-5,51	4,15
Inflasi (%)	- (Merauke) 0,31 (Jayapura)	0,86 (Merauke) 0,66 (Jayapura)	0,99	0,34	0,30	0,42

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan indikator sosial dan ekonomi di tiga provinsi penerima Dana otonomi Khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh). Adapun dari indikator sosialnya, dapat kita lihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Papua pada tahun 2009 sebesar 63,41 dan tahun 2019 sebesar 60,84. Sementara itu di Provinsi Papua Barat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2009 sebesar 68,58 dan pada tahun 2019 sebesar 64,70. Indeks Pembangunan di Provinsi Papua Barat cenderung menurun jika dibandingkan antara tahun 2009 dan 2019. Sedangkan di Provinsi Aceh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2009 sebesar 70,53 dan pada tahun 2019 sebesar 71,9. Di Provinsi Aceh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) cenderung meningkat jika dibandingkan antara

tahun 2009 dan tahun 2019. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Papua dan Papua Barat lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Aceh.

Jika kita lihat Gini Rasio di tiga Provinsi yang menerima Dana Otonomi Khusus, maka Gini rasio di tiga Provinsi ini cenderung meningkat, maka semakin besar terjadi ketimpangan di ketiga provinsi ini. Pada tahun 2009, Gini Rasio di Provinsi Papua sebesar 0,38 persen dan pada tahun 2019 sebesar 0,41 persen. Sementara itu di Provinsi Papua Barat Gini Rasio pada tahun 2009 sebesar 0,35 persen dan pada tahun 2019 sebesar 0,42 persen. Dan di Provinsi Aceh, Gini Rasio pada tahun 2009 sebesar 0,30 persen dan pada tahun 2019 sebesar 0,32 persen. Pada tahun 2009, ketimpangan di Provinsi Papua yang paling besar diantara tiga provinsi ini, sedangkan pada tahun 2019 ketimpangan paling besar berada di Provinsi Papua Barat.

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua pada tahun 2009 sebesar 37,53 persen dan pada tahun 2019 sebesar 26,55 persen. Sementara itu Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Papua Barat pada tahun 2009 sebesar 37,51 persen dan pada tahun 2019 sebesar 21,51 persen. Dan di Provinsi Aceh, Persentase Penduduk Miskin pada tahun 2009 sebesar 21,80 persen dan pada tahun 2019 sebesar 15,01 persen. Persentase Penduduk Miskin di tiga provinsi ini menurun jika dibandingkan antara tahun 2009 dan tahun 2019. Pemerintah pusat sebenarnya bukan tidak peduli dengan situasi kemiskinan yang terjadi, namun sejumlah anggaran terus dikucurkan namun persoalan kemiskinan belum juga teratasi. Pemerintah pusat menggelontorkan dana yang tidak sedikit setiap tahunnya untuk ketiga provinsi ini. Pada tahun 2019, dana yang

diturunkan untuk Provinsi Papua sebesar 15,15 triliun rupiah. Kemudian Provinsi Papua Barat mendapat suntikan dana sebesar 11,34 triliun rupiah. Sedangkan di Provinsi Aceh, dana yang digelontorkan juga tidak kalah besar, sekitar 15,75 triliun rupiah dana yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Dengan dana sebesar ini namun kemiskinan di ketiga provinsi ini belum juga teratasi, hal ini menimbulkan kecurigaan publik bahwa anggaran belasan triliun rupiah yang telah dikucurkan telah dikorupsi oleh pejabat daerah itu sendiri. Pemerintah pusat juga perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran agar dapat digunakan sepenuhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi pendidikan, setiap warga negara Indonesia diwajibkan menempuh pendidikan minimal 12 tahun atau setara dengan tamat SMA/SMK/MA. Namun dari data diatas, dapat kita lihat kenyataannya di Provinsi Papua tahun 2009, rata-rata lama sekolah masyarakat yang menempuh pendidikan hanya 6,57 tahun atau setara dengan tamatan Sekolah Dasar. Kemudian kita lihat di satu dekade setelahnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua hanya 6,65 tahun, tidak ada peningkatan dari 10 tahun sebelumnya. Sedangkan di Provinsi Papua Barat tahun 2009, pendidikan yang ditempuh hanya selama 8,01 tahun atau setara dengan kelas 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Kemudian 1 dekade setelahnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Papua Barat menurun menjadi 7,6 tahun. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, Christian Sohilait mengatakan bahwa masalah pendidikan di Papua terdiri dari kendala minimnya sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan dan jaminan kehidupan bagi guru, hingga konflik sosial yang berdampak pada siswa.

Konflik antara aparat keamanan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan masyarakat lainnya memberikan dampak ketidaknyamanan terhadap keamanan dalam jalannya pendidikan. Sementara di Provinsi Aceh, rata-rata lama sekolah tahun 2009 hanya 8,63 dan pada tahun 2019 selama 9,18 tahun. Rata-rata lama sekolah di tiga provinsi ini sangat jauh dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut Kemendikbud (2015), alasan rendahnya pendidikan di Provinsi Aceh diantaranya masih banyak sekolah yang belum memiliki prasarana sekolah seperti ruang perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan ruang laboratorium. Kemudian masih banyak guru yang tidak layak mengajar di jenjang SD dan SMP.

Angka Harapan Hidup di Provinsi Papua tahun 2009 selama 68,35 tahun sedangkan tahun 2019 selama 65,65 tahun, selama 1 dekade terjadi penurunan angka harapan hidup. Kemudian kita lihat di provinsi Papua tahun 2009, angka harapan hidup selama 68,20 tahun sedangkan tahun 2019 selama 66,02. Rata-rata angka harapan hidup di Indonesia tahun 2009 adalah 69,21 dan tahun 2019 adalah 73,3 tahun. Angka harapan hidup di Provinsi Papua dan Papua Barat pada tahun 2009 dan 2019 berada dibawah rata-rata angka harapan hidup di Indonesia. Rendahnya angka harapan hidup disebabkan oleh banyak hal, mulai dari minimnya akses dan fasilitas kesehatan masyarakat. Padahal seharusnya, tingkat kesehatan masyarakat perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah setempat. Namun di Provinsi Aceh, angka harapan hidup tahun 2009 selama 68,60 tahun sedangkan tahun 2019 selama 69,87, dapat kita lihat adanya peningkatan angka harapan hidup. Penurunan angka harapan hidup diantaranya disebabkan oleh pemenuhan gizi suatu penduduk yang tidak

terpenuhi sehingga menimbulkan berbagai penyakit, dan di ketiga Provinsi ini termasuk ke dalam provinsi yang tingkat kemiskinannya tinggi.

Kemudian dari indikator ekonomi di Provinsi Papua seperti PDRB atas harga konstan di Provinsi Papua pada tahun 2009 sebesar 23,14 triliun rupiah dan PDRB atas harga konstan pada tahun 2019 sebesar 134,56 triliun rupiah. Sementara di Provinsi Papua Barat, PDRB tahun 2009 sebesar 7,29 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 62,07 triliun rupiah. Sedangkan di Provinsi Aceh sendiri, PDRB pada tahun 2009 sebesar 32,22 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sebesar 132,09 triliun rupiah. 3 sektor terbesar penyumbang PDRB di Provinsi Papua adalah (1) Pertambangan dan Penggalian, (2) Konstruksi, (3) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, 3 sektor terbesar penyumbang PDRB adalah (1) Industri Pengolahan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Konstruksi. Selanjutnya 3 sektor terbesar penyumbang PDRB di Provinsi Aceh adalah (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pedagang Besar & Eceran, dan Repasrasi Mobil, (3) Konstruksi.

Kemudian PDRB perkapita di tahun 2009 sebesar 8,53 juta rupiah/tahun dan di tahun 2019 sebesar 39,85 juta/tahun. Sementara di Provinsi Papua Barat jumlah PDRB perkapita pada tahun 2009 sebesar 9,87 juta rupiah/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 64,68 juta rupiah/tahunnya. Sedangkan di Provinsi Aceh jumlah PDRB perkapita pada tahun 2009 sebesar 7,48 juta rupiah/tahun dan pada tahun 2019 sebesar 24,59 juta rupiah/tahunnya.

Dapat kita lihat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua pada tahun 2009 sebesar 24,99 persen dan pada tahun 2019 sebesar -15,72. Jika dibandingkan

dengan tahun 2009 yang dimana saat itu adalah era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang dimana pada saat itu adalah era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat turun drastis hingga mencapai angka -15,72 persen karena adanya penurunan produksi tambang di Freeport yang disebabkan oleh peralihan sistem tambang Freeport ke underground atau penambangan bawah tanah. Sementara di provinsi Papua Barat, pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 sebesar 23,98 persen dan di tahun 2019 sebesar 2,66 persen. Sedangkan di Provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 sebesar -5,51 dan tahun 2019 sebesar 4,15 persen. Berbeda dengan provinsi Papua dan Papua Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2019 di provinsi Aceh mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009 yang dimana masih dalam era pemerintahan SBY. Suatu negara memerlukan pertumbuhan yang tinggi untuk menambah lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, itu sebabnya presiden Jokowi menjanjikan pertumbuhan yang meroket hingga 7 persen/tahunnya. Namun pada kenyataannya, jika dilihat dari ketiga provinsi yang menerima Dana Otonomi Khusus janji itu tidak terpenuhi. Data diatas mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi di era pemerintahan Presiden Jokowi lebih lambat ketimbang di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Inflasi di Provinsi Papua tahun 2009 sebesar 0,31 persen untuk wilayah Jayapura dan tahun 2019 sebesar 0,86 persen untuk wilayah Merauke dan 0,66 persen untuk Jayapura. Kemudian di Provinsi Papua Barat, inflasi pada tahun 2009 sebesar 0,99 persen dan tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2009 menjadi 0,34 persen. sedangkan di Provinsi Aceh, inflasi pada

tahun 2009 sebesar 0,30 persen dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 0,12 persen menjadi 0,42 persen.

4.4 Estimasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus

4.4.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Tiga Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh)

Tabel 4.9
Tingkat Kemiskinan Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh
Tahun 2017-2020

Tahun	Papua	Papua Barat	Aceh
2017	27,76	23,12	15,92
2018	27,43	22,66	15,68
2019	26,55	21,51	15,01
2020	26,80	21,70	15,43
2021	26,80	21,84	15,33

Sumber: www.bps.go.id (data diolah)

Selama periode September 2017 sampai September 2020, Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua berfluktuasi. Pada September 2017, tingkat kemiskinan berada di angka 27,76 persen. Sementara itu pada September 2018, tingkat kemiskinan berada di angka 27,43 persen. Kemudian pada periode September 2019 tingkat kemiskinan berada di angka 26,55 persen dan terjadi penurunan sebesar 0,88 persen dibandingkan tahun 2018. Di periode September 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,25 persen dibandingkan tahun 2019. Tingkat kemiskinan di periode September 2020 tercatat di angka 26,80 persen dan pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan di

Provinsi Papua tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat berfluktuasi pada tahun 2017 - 2020. Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat berfluktuasi. Pada September 2017, tingkat kemiskinan berada di angka 23,12 persen. Sementara itu pada September 2018, tingkat kemiskinan berada di angka 22,60 persen. Kemudian pada periode September 2019 tingkat kemiskinan berada di angka 21,51 persen dan terjadi penurunan sebesar 1,09 persen dibandingkan tahun 2018. Di periode September 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,19 persen dibandingkan tahun 2019. Tingkat kemiskinan di periode September 2020 tercatat di angka 21,70 persen sedangkan pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Barat mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Selama periode September 2017 sampai September 2020, Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh berfluktuasi. Pada September 2017, tingkat kemiskinan berada di angka 15,92 persen. Pada September 2018, tingkat kemiskinan berada di angka 15,68 persen. Kemudian pada periode September 2019 tingkat kemiskinan berada di angka 15,01 persen dan terjadi penurunan sebesar 0,67 persen dibandingkan tahun 2018. Di periode September 2020 terjadi peningkatan sebesar 0,42 persen dibandingkan tahun 2019. Tingkat kemiskinan di periode September 2020 tercatat di angka 15,43 persen sedangkan pada tahun 2021 Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.4.2 Perkembangan Variabel yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Tiga Provinsi Penerima Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh)

1. Transfer Ke Daerah (TKD)

Tabel 4.10
Transfer Ke Daerah (TKD) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh
(ribu rupiah)

Tahun	Papua	Papua Barat	Aceh
2017	3.877.858.773	1.902.791.698	3.494.252.282
2018	4.136.246.408	2.266.973.176	4.020.907.344
2019	4.255.602.044	4.499.414.248	4.496.011.752
2020	4.715.803.993	2.603.238.900	4.103.822.620
2021	4.760.525.295	2.219.514.185	3.870.852.657

Sumber: www.dpj.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan Transfer Ke Daerah di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh berfluktuasi. Pada tahun 2017, TKD Provinsi Papua sebesar Rp 3,88 triliun. Sementara itu pada tahun 2018, TKD di Provinsi Papua sebesar Rp 4,14 triliun, kemudian pada tahun 2019 meningkat sebesar Rp 89 miliar menjadi Rp 4,26 triliun. Dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 490 miliar menjadi Rp 4,72 triliun, dan pada tahun 2021 transfer ke daerah Provinsi Papua juga mengalami kenaikan menjadi Rp 4,76 triliun.

TKD di Provinsi Papua Barat pada tahun 2017 sebesar Rp 1,9 triliun. Sementara itu TKD pada tahun 2018 sebesar Rp 2,27 triliun. Kemudian

pada tahun 2019 meningkat sekitar 2,2 triliun menjadi Rp 4,5 triliun, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 menjadi Rp 2,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2021 transfer ke daerah Provinsi Papua Barat menurun menjadi Rp 2,2 triliun dibandingkan dengan tahun 2020.

Selanjutnya di Provinsi Aceh, TKD tahun 2017 sebesar Rp 3,5 triliun, sementara itu TKD pada tahun 2018 sebesar Rp 4,02 triliun, kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar Rp 476 miliar menjadi Rp 4,5 triliun. Namun pada tahun 2020, TKD Provinsi di Aceh sebesar 4,1 triliun, mengalami penurunan sekitar Rp 393 miliar dibandingkan tahun 2019. Namun pada tahun 2021 transfer ke daerah Provinsi Papua menurun menjadi Rp 3,9 triliun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2. Dana Otonomi Khusus (DOK)

Tabel 4.11

**Dana Otonomi Khusus (DOK) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh
(ribu rupiah)**

Tahun	Papua	Papua Barat	Aceh
2017	8.200.000.000	3.300.000.000	8.000.000.000
2018	7.980.152.407	4.010.000.000	8.030.000.000
2019	8.632.676.695	3.950.000.000	8.360.000.000
2020	8.370.000.000	4.340.000.000	8.340.000.000
2021	8.086.837.607	4.090.253.770	7.805.827.805

Sumber: www.dpj.k.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan Dana Otonomi Khusus di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dari tahun 2017 - 2020 terus meningkat. Pada tahun 2017, DOK di Provinsi Papua sebesar Rp 8,2 triliun dan pada tahun 2018, DOK di Provinsi Papua sebesar Rp 7,9 triliun, kemudian pada tahun 2019 meningkat sekitar Rp 129,8 juta menjadi Rp 8,63 triliun. Dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sekitar Rp 446 juta menjadi Rp 8,37 triliun, namun pada tahun 2021 DOK di Provinsi Papua menurun menjadi Rp 8,09 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Di Provinsi Papua Barat, DOK pada tahun 2017 sebesar Rp 3,3 triliun dan DOK pada tahun 2018 sebesar Rp 4,01 triliun. Kemudian pada tahun 2019 menurun sekitar Rp 130 juta menjadi Rp 3,95 triliun, dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sekitar Rp 258 juta menjadi Rp 4,34 triliun, namun pada tahun 2021 DOK di Provinsi Papua Barat menurun menjadi Rp 4,09 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

Selanjutnya di Provinsi Aceh, DOK tahun 2017 sebesar Rp 8 triliun dan DOK tahun 2018 sebesar Rp 8,03 triliun kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar Rp 318 miliar menjadi Rp 8,36 triliun. Dan tahun 2020, DOK Provinsi di Aceh sebesar Rp 8,34 triliun, dibandingkan tahun 2019 DOK Provinsi Aceh meningkat sekitar Rp 57 miliar, namun pada tahun 2021 DOK di Provinsi Aceh menurun menjadi Rp 7,81 triliun dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Dana Desa (DD)

Tabel 4.12

**Dana Desa (DD) Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh
(ribu rupiah)**

Tahun	Papua	Papua Barat	Aceh
2017	4.300.947.518	1.364.412.395	4.892.571.795
2018	2.331.876.903	980.569.729	4.436.270.240
2019	2.681.604.729	1.194.052.640	4.848.475.455
2020	3.087.036.242	1.216.666.527	5.009.463.449
2021	5.400.000.000	1.550.000.000	4.980.000.000

Sumber: www.dpj.kemenkeu.go.id

Dari tabel diatas dapat kita lihat perkembangan Dana Desa di Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh dari tahun 2017 - 2020 terus meningkat. Pada tahun 2017, DD di Provinsi Papua sebesar Rp 4,3 triliun dan pada tahun 2018, DD di Provinsi Papua sebesar Rp 2,3 triliun, kemudian pada tahun 2019 meningkat sekitar Rp 350 miliar menjadi Rp 2,7 triliun. Dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan sekitar Rp 406 miliar menjadi Rp 3,1 triliun. Namun pada tahun 2021 Dana Desa di Provinsi Papua meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi 5,4 triliun.

Di Provinsi Papua Barat, DD pada tahun 2017 sebesar Rp 1,36 triliun dan DD pada tahun 2018 sebesar Rp 908,57 miliar. Kemudian pada tahun 2019 meningkat sekitar Rp 214 miliar menjadi Rp 1,2 triliun dan pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 sekitar Rp 22 miliar menjadi Rp 1,22 triliun. Namun pada tahun 2021 Dana Desa di

Provinsi Papua Barat menurun dibandingkan tahun 2020 menjadi 4,98 triliun.

Selanjutnya di Provinsi Aceh, DD tahun 2017 sebesar Rp 4,89 triliun dan DD tahun 2018 sebesar Rp 4,44 triliun kemudian di tahun 2019 mengalami kenaikan sekitar Rp 412 miliar menjadi Rp 4,85 triliun. Dan tahun 2020, DD Provinsi di Aceh sebesar Rp 5,01 triliun, dibandingkan tahun 2019 DD Provinsi Aceh meningkat sekitar Rp 161 miliar. Namun pada tahun 2021 Dana Desa di Provinsi Aceh meningkat dibandingkan tahun 2020 menjadi 5,4 triliun.

4.5 Hasil Analisis Regresi

Tabel 4.13
Hasil Regresi Berganda

Dependent Variable: TK
Method: Panel Least Squares
Date: 09/14/21 Time: 15:53
Sample: 2017 2021
Periods included: 5
Cross-sections included: 3
Total panel (balanced) observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.64835	2.217447	13.37049	0.0000
TKD	-4.30E-13	1.44E-13	-2.986910	0.0153
DOK	-9.41E-13	3.25E-13	-2.892472	0.0178
DD	-3.96E-14	1.25E-13	-0.316601	0.7588

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.997286	Mean dependent var	21.56933
Adjusted R-squared	0.995777	S.D. dependent var	4.943475
S.E. of regression	0.321232	Akaike info criterion	0.855869
Sum squared resid	0.928710	Schwarz criterion	1.139089
Log likelihood	-0.419014	Hannan-Quinn criter.	0.852852
F-statistic	661.3091	Durbin-Watson stat	1.544799
Prob(F-statistic)	0.000000		

Keterangan: *** *Level of Signifikan*, ***1%, **5%

Dari hasil regresi di atas, dari tiga variabel bebas terdapat dua variabel bebas yang signifikan dengan derajat kesalahan 5%. Namun ditemukan masalah bahwa secara parsial terdapat variabel yang tidak signifikan dalam hasil di atas yaitu TKD (Transfer ke Daerah). Dan didapati bahwa adjusted R-square nya bernilai 0,997286 atau 99,72 persen.

4.5.1 Penaksiran

1. Korelasi (R)

Dari hasil regres pada model diatas yang sudah ditransformasikan kelogaritma natural, diperoleh R sebesar 0,99864207802 artinya bahwa derajat kerataan antara TKD (Transfer ke Daerah), DOK (Dana Otonomi Khusus), dan DD (Dana Desa) dengan Tingkat Kemiskinan (TK) adalah sebesar 0,99864207802.

Suatu variabel bebas dikatakan memiliki kekuatan hubungan yang positif terhadap variabel terikat apabila memiliki nilai koefisien bertanda positif dan bernilai diatas $\alpha = 5\%$. Dan dikatakan signifikan apabila nilai *probability* dari variabel bebas tersebut lebih kecil dari 5%.

2. Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien Determinasi (*R Square*) menunjukkan proporsi persentase variabel total dalam menjelaskan variabel terikat (dependen) yang dijelaskan oleh variabel bebas (independen) secara bersama-sama. Berdasarkan dari model estimasi diatas yaitu

variabel-variabel yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (TK) dapat dilihat nilai R^2 sebesar 0,997286 artinya secara bersama-sama Transfer ke Daerah (TKD), Dana Otonomi Khusus (DOK), dan Dana Desa (DD) memberikan variasi penjelasan terhadap Tingkat Kemiskinan (TK) sebesar 99,72 %. Sedangkan 0,28 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak masuk ke dalam model estimasi, seperti PDRB, IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Rasio Gini, dan Pertumbuhan Ekonomi.

4.5.2 Interpretasi Hasil

Dari data yang telah diperoleh, maka model regresinya adalah sebagai berikut.

$$TK_{rt} = \alpha_0 + \alpha_1 \cdot TKD_{rt} + \alpha_2 \cdot DOK_{rt} + \alpha_3 \cdot DD_{rt} + \varepsilon_{rt}$$

Maka interpretasi hasil model pertama adalah sebagai berikut:

$$TK_{rt} = 29.64835 + (-4.30E-13) TKD_{rt} + (-9.41E-13) DOK_{rt} + (-3.96E-14) DD_{rt} + \varepsilon_{rt}$$

Dari hasil estimasi yang diperoleh sebuah interpretasi model regresi linier berganda tersebut sebagai berikut:

- a. Variabel TKD (Transfer Ke Daerah) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sebab koefisien $\alpha_1 = -4.30E-13$ artinya apabila TKD dinaikan sebesar 1 triliun rupiah, maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar -4.30×10^{-13} atau -0.000000000000430 persen. Hasil ini ternyata sesuai dengan teori

yang menyatakan bahwa jika transfer ke daerah meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan (begitu sebaliknya).

- b. Variabel DOK (Dana Otonomi Khusus) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Tingkat Kemiskinan, sebab koefisien $\alpha_2 = -9.41E-13$ artinya apabila dana otonomi khusus dinaikan sebesar 1 triliun rupiah, maka akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar -9.41×10^{-13} atau 0.000000000000941 persen. Hasil ini ternyata sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika dana otonomi khusus meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan.
- c. Variabel DD (Dana Desa) mempunyai pengaruh yang negatif terhadap Tingkat Kemiskinan, sebab koefisien $\alpha_3 = -3.96E-14$ artinya apabila dana desa dinaikkan sebesar 1 triliun rupiah, maka akan mengurangi tingkat kemiskinan sebesar -3.96×10^{-14} atau 0.0000000000000396 persen. Hasil ini ternyata sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika transfer ke daerah meningkat maka akan menurunkan tingkat kemiskinan (begitu sebaliknya).

4.5.3 Konstanta dan Intersep

Dalam hasil estimasi data pada model regresi linier berganda, terdapat nilai konstanta sebesar 29.64835 yang bernilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat nilai rata-rata Tingkat Kemiskinan cenderung meningkat ketika variabel penjelas tetap. Untuk interpretasi hasil regresi variabel independen akan dijelaskan sebagai berikut:

1. TKD (Transfer ke Daerah)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel TKD adalah -4.30×10^{-13} dimana variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan untuk tiga provinsi penerima dana otonomi khusus. Nilai *probability* adalah sebesar 0.0153 ($< \alpha$ 5%). Hal ini menunjukkan bahwa hubungan TKD dengan Tingkat Kemiskinan adalah negatif dan signifikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika TKD meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka Tingkat Kemiskinan akan menurun sebesar -4.30×10^{-13} atau 0.00000000000430 persen. Oleh karena itu, variabel TKD terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

2. DOK (Dana Otonomi Khusus)

Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel DOK adalah -9.41×10^{-13} dimana variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Nilai *probability* adalah sebesar 0.0178 ($< \alpha$ 5%). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara DOK terhadap Tingkat Kemiskinan untuk tiga Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika DOK meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka Tingkat Kemiskinan akan menurun sebesar -9.41×10^{-13} atau 0.00000000000941 persen.

3. Dari hasil regresi, nilai koefisien variabel DD adalah -3.96×10^{-14} dimana variabel tersebut berpengaruh tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan. Nilai *probability* adalah sebesar 0.7588 ($> \alpha$

5%). Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang negatif dan tidak signifikan antara DD terhadap Tingkat Kemiskinan untuk tiga Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus dalam kurun waktu satu tahun. Sehingga dapat dikatakan bahwa jika DD meningkat sebesar 1 triliun rupiah maka Tingkat Kemiskinan akan menurun sebesar -3.96×10^{-14} atau 0.00000000000000396 persen.

Peneliti Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan dana desa sebagai salah satu instrumen yang belum terbukti efektif, apalagi angka kemiskinan di desa masih lebih tinggi dibandingkan di kota. Hal ini disebabkan karena dana desa masih banyak digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan saluran irigasi. Sementara itu program pemberdayaan ekonomi yang berfokus pada pengentasan kemiskinan belum banyak tersentuh.

4.5.4 Uji Statistik

1. Uji Signifikan Parameter (Uji-t)

Uji-t statistik dilakukan bertujuan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen secara individual menjelaskan variasi variabel dependen. Regresi pengaruh variabel TKD, DOK, dan DD dengan uji autoregressive terhadap Tingkat Kemiskinan di tiga Provinsi penerima Dana Otonomi Khusus. Adapun dalam penelitian ini untuk melihat nilai *ttabel* yaitu: $df (n) - k = 15 - 4 = 11$, $\alpha = 5\%$ maka nilai *t tabel* sebesar 2,201.

2. Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Uji-F statistik bertujuan untuk pengujian signifikan semua variabel independen secara bersama-sama terhadap nilai variabel dependen. Dari hasil regresi dengan menggunakan autoregressive pada model, variabel TKD, DOK, dan DD terhadap Tingkat Kemiskinan tiga Provinsipenerima Dana Otonomi Khusus, maka nilai F_{tabel} sebesar 0,113 (<15%) sedangkan F_{hitung} adalah sebesar 661.3091. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

4.5.5 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Multikolinearitas

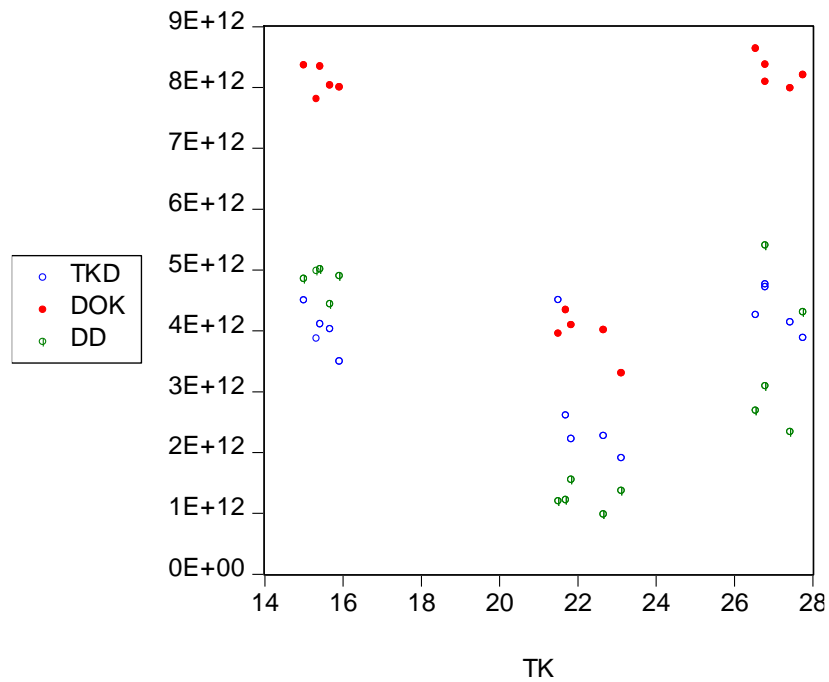
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang pertama ataupun yang kedua terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Syarat model regresi yang baik adalah seharusnya terbebas dari multikolinearitas, dan dapat dilihat dari hasil analisa model tidak ada ditemukan multikolinearitas.

2. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut terjadi heterokedastisitas dan jika berbeda disebut tidak terjadi heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terbebas dari heterokedastisitas. Untuk melihat ada atau tidaknya heterokedastisitas, dapat dilakukan

dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya. Dasar analisis heterokedastisitas sebagai berikut:

Gambar 4.4 Scatterplot Model



Sumber: E-views 10 dan data diolah

Gambar di atas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak pada sumbu X dan Y. Dengan demikian disimpulkan tidak terjadi heterokedastisita.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan penggunaan pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk menguji apakah suatu model terdapat autokorelasi dalam

penelitian ini maka digunakan uji statistik Durbin Watson yaitu dengan cara melihat nilai (D-W) yang diperoleh. Pada model pertama setelah dilakukan pengujian dalam bentuk logaritma natural diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 1.544799, artinya model yang digunakan sudah terbebas dari masalah autokorelasi sehingga model bisa diestimasi melalui variabel bebas yang digambarkan melalui variabel TK.

4. Uji Hausman

Untuk menentukan model regresi pada data panel, maka dilakukan uji signifikan antara model Fixed Effect dan Random Effect untuk mengetahui model mana yang lebih tepat untuk digunakan. Berikut hasil pengujiannya:

Tabel 4.14
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.000000	3	1.0000

a

* Period test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

** WARNING: robust standard errors may not be consistent with assumptions of Hausman test variance calculation.

i hasil di atas, maka di dapat nilai random effect sebesar 1,0000.

Nilai probability > 0,05 maka model yang dipilih adalah fixed effect. Maka dapat disimpulkan baha model fixed effect lebih tepat dibandingkan model random effect.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dana Otonomi Khusus diberikan kepada tiga provinsi penerima Dana Otonomi Khusus (Papua, Papua Barat, dan Aceh) sebagai bentuk pendekatan damai dari pemerintah karena adanya konflik disintegrasi yang terjadi karena adanya kecemburuan antara wilayah timur dan barat Indonesia karena mereka merasa seperti di anak tirikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan hasil kekayaan alam mereka sudah habis di ambil oleh pemerintah pusat namun tidak ada pemerataan pembangunan di wilayah mereka. Pemerintah daerah belum efektif dalam mengimplementasikan Dana Otonomi Khusus, hal ini dibuktikan oleh sikap pejabat pelaksana belum mampu memanfaatkan secara maksimal kewenangan yang dimilikinya sehingga berdampak tidak optimalnya kesejahteraan masyarakat.
2. Hasil estimasi model pertama yaitu pengaruh TKD, DOK, DD terhadap TK sebesar 99,72%, sedangkan sisanya 0,28% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model estimasi atau berada dalam *disturbance error term*.
3. Secara bersama-sama variabel TKD, DOK, dan DD berpengaruh besar terhadap Tingkat Kemiskinan (TK).

4. Secara simultan, variabel TKD, DOK, berpengaruh negatif dan signifikan namun variabelDD berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan (TK).

5.2 Saran

1. Dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, faktanya masih terjadi disorientasi sasaran yang belum sesuai dengan harapan. Pelaksanaan dari Dana Otonomi Khusus ini masih membutuhkan pengawasan, baik pengawasan intern dari pemerintah maupun pengawasan dari lembaga lain yang dibentuk untuk melakukan pengawasan lebih terhadap pelaksanaan Dana Otonomi Khusus ini.
2. Pemberian sanksi dan meningkatkan pengawasan yang tegas bagi provinsi yang melakukan pelanggaran dan penyelewengan Dana Otonomi Khusus. Dan diharapkan penggunaan dana ini dapat digunakan dengan tepat dan sesuai sehingga mampu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
3. Diperlukan pengalokasian dan pengimplementasian mekanisme transfer daerah dilakukan dengan sebaik-baiknya dan harus sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Majid, M. S. (2014). Analisis tingkat pendidikan dan kemiskinan di Aceh. *Jurnal Pencerahan*, 8(1).
- Arsyad, Lincolin. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFPE.
- Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. (Eds.). (2018). *Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jalil, H., Abidin, A., & Rezah, F. S. (2017). *Hukum Pemerintahan Daerah dalam Perspektif Otonomi Khusus*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Aceh Dalam Angka 2019. www.aceh.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Aceh Dalam Angka 2020. www.aceh.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Papua Dalam Angka 2019. www.papua.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. Papua Dalam Angka 2020. www.papua.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Papua Barat Dalam Angka 2019. www.papuabarat.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat. Papua Barat Dalam Angka 2020. www.papuabarat.bps.go.id.
- Badan Pusat Statistik 2019. www.bps.go.id
- Badan Pusat Statistik 2020. www.bps.go.id
- Basyir, A. H., & Syahnur, S. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH. *Jurnal Ilmu Ekonomi: Program Pascasarjana Unsyiah*, 3(1).
- Cahyono, H. (2016). Evaluasi Atas Pelaksanaan Otonomi Khusus Aceh: Gagal Menyejahterakan Rakyat Dan Sarat Konflik Internal. *Jurnal Penelitian Politik*, 9(2), 22.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Provinsi Papua.

- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Provinsi Papua Barat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2017 Provinsi Aceh.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 Provinsi Papua.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 Provinsi Papua Barat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2018. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 Provinsi Aceh.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 Provinsi Papua.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 Provinsi Papua Barat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2019. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2019 Provinsi Aceh.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Provinsi Papua.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Provinsi Papua Barat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2020. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Provinsi Aceh.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Provinsi Papua.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Provinsi Papua Barat.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2021. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Provinsi Aceh.
- Gujarati, Damodar. (1995). *Ekonometrika Dasar edisi ketiga* . Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrik Dasar edisi keempat*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar. (2006). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.

- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Isnadi, N., & Fikriah, F. (2019). Dampak Dana Otonomi Khusus Terhadap Tingkat Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, 4(1), 29-37.
- Jalil, H., Yani, T. A., & Yoesoef, M. D. (2010). Implementasi Otonomi Khusus di Provinsi Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2), 206-234.
- Jhingan, M.L. (2000). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jonnadi, A., Amar, S., & Aimon, H. (2012). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 1(1).
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 1-8.
- Muliadi, M., & Amri, K. (2019). Penerimaan zakat dan penurunan kemiskinan di Aceh: Peran dana otonomi khusus sebagai pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 231-244.
- Permatasari, A. (2014). Otonomi khusus daerah perbatasan, alternatif solusi penyelesaian masalah perbatasan di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 16.
- Safuridar, S., & Damayanti, M. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan dan PDRB per Kapita terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*, 9(2), 180-187.
- Suyanto, B. (2001). Kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat miskin. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 14(4), 25-42.
- Todaro, Michael P & Stephen C. Smith. (2011). *Pembangunan Ekonomi edisi 11*. Jakarta: Erlangga.
- Ustama, D. D. (2009). Peranan pendidikan dalam pengentasan kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(1), 1-12.
- Widodo, B. T. (2019). Evaluasi Dinamis Dampak Fiskal Otonomi Khusus terhadap Efisiensi Layanan Publik Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi

- Papua, Papua Barat dan Aceh Tahun 2011-2017. *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, 3(1), 31-53.
- Zuhdiyaty, N., & Kaluge, D. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia Selama Lima Tahun Terakhir. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*, 11(2), 27-31.
- Zulfan, T., & Maulana, H. (2019). Gejala fly paper effect di provinsi Aceh ditinjau dari dana alokasi umum dan dana otonomi khusus. *INOVASI*, 15(2), 188-197.
- Sasana, H. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, 18(1), 24285.
- Sudewi, N. N. A., & Wirathi, I. G. A. P. (2013). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(3), 44435.
- Widarwanto, A., Erliana, E., & Yahya, I. (2014). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA BAGI HASIL (DBH), BANTUAN KEUANGAN PROVINSI (BKP) TERHADAP IPM DENGAN BELANJA PELAYANAN DASAR (BPD) SEBAGAI MODERATING VARIABEL. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 7(2), 107-123.
- YANTI, J. S. (2017). MEKANISME PENYALURAN TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA DI WILAYAH ACEH PADA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH. *ETD Unsyiah*.

LAMPIRAN

DATA DAN HASIL PENGOLAHAN E-VIEWS 10

**Data Tingkat Kemiskinan, Transfer Ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan
Dana Desa Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh Tahun 2017-2021**

Tahun	TK	TKD	DOK	DD
2017	27.76	3877858773000	8200000000000	4300947518000
2018	27.43	4136246408000	7980152407000	2331876903000
2019	26.55	4255602044000	8632676695000	2681604729000
2020	26.80	4715803993000	8370000000000	3087036242000
2021	26.8	4760525295000	8086837607000	5400000000000
2017	23.12	1902791698000	3300000000000	1364412395000
2018	22.66	2266973176000	4010000000000	980569729000
2019	21.51	4499414248000	3950000000000	1194052640000
2020	21.70	2603238900000	4340000000000	1216666527000
2021	21.84	2219514185000	4090253770000	1550000000000
2017	15.92	3494252282000	8000000000000	4892571795000
2018	15.68	4020907344000	8030000000000	4436270240000
2019	15.01	4496011752000	8360000000000	4848475455000
2020	15.43	4103822620000	8340000000000	5009463449000
2021	15.33	3870852657000	7805827805000	4980000000000

Statistik Deskriptif

	TK	TKD	DOK	DD
Mean	23.14750	3.56E+12	6.08E+12	2.79E+12
Median	22.89000	3.95E+12	7.99E+12	2.51E+12
Maximum	27.76000	4.76E+12	8.63E+12	5.40E+12
Minimum	15.68000	1.90E+12	4.09E+09	9.81E+11
Std. Dev.	4.184369	1.04E+12	2.83E+12	1.61E+12
Skewness	-0.635326	-0.448884	-0.844180	0.378516
Kurtosis	2.307136	1.646103	2.508685	1.615899
Jarque-Bera	1.047309	1.319512	1.545976	1.244416
Probability	0.592352	0.516978	0.461632	0.536758
Sum	277.7700	4.28E+13	7.29E+13	3.34E+13
Sum Sq. Dev.	192.5984	1.19E+25	8.79E+25	2.84E+25
Observations	12	12	12	12

Sumber: E-views 10 (data diolah)

Hasil Regresi Berganda

Dependent Variable: TK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 09/14/21 Time: 15:53
 Sample: 2017 2021
 Periods included: 5
 Cross-sections included: 3
 Total panel (balanced) observations: 15

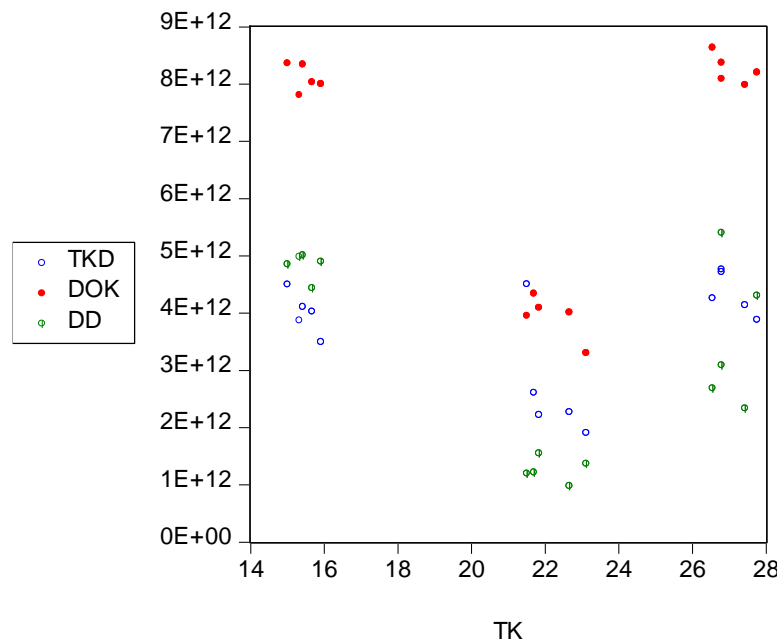
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	29.64835	2.217447	13.37049	0.0000
TKD	-4.30E-13	1.44E-13	-2.986910	0.0153
DOK	-9.41E-13	3.25E-13	-2.892472	0.0178
DD	-3.96E-14	1.25E-13	-0.316601	0.7588

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.997286	Mean dependent var	21.56933
Adjusted R-squared	0.995777	S.D. dependent var	4.943475
S.E. of regression	0.321232	Akaike info criterion	0.855869
Sum squared resid	0.928710	Schwarz criterion	1.139089
Log likelihood	-0.419014	Hannan-Quinn criter.	0.852852
F-statistic	661.3091	Durbin-Watson stat	1.544799
Prob(F-statistic)	0.000000		

Scatterplot Model



Uji Haussman

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	0.000000	3	1.0000

* Period test variance is invalid. Hausman statistic set to zero.

** WARNING: robust standard errors may not be consistent with assumptions of Hausman test variance calculation.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 168/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/11/2/2021

Kepada Yth.

Medan, 11/2/2021

Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ade Shandra Pratiwi
NPM : 1705180030
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : kebijakan data otonomi khusus pasca desentralisasi fiskal di Indonesia

Rencana Judul : 1. Analisis kebijakan data otonomi khusus pasca desentralisasi fiskal di Indonesia
2. Pengaruh pendapatan terhadap keputusan pembelian secara kredit di kota Medan ditinjau dari perspektif ekonomi islam
3. Persepsi masyarakat tentang penggunaan uang digital di kota Medan

Objek/Lokasi Penelitian : Aceh dan Papua

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon

(Ade Shandra Pratiwi)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3, Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 168/JDL/SKR/EP/FEB/UMSU/11/2/2021

Nama Mahasiswa : Ade Shandra Pratiwi
NPM : 1705180030
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Riset Ekonomi dan Bisnis
Tanggal Pengajuan Judul : 11/2/2021
Nama Dosen pembimbing*) : Lailan Saefma. Hsb.
Judul**) : Analisis kebijakan ekonomi khusus terhadap
Kemiskinan di provinsi Aceh.

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Pratiyaya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan,
Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan
*) Dosen ahli Program Studi
**) Dosen ahli Dosen Pembimbing
Semua dokumen oleh Prodi dan Tim pembimbing, scan/ foto dan upload ke sistem Verifikasi LK201 pada form online "Upload Pengajuan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pada hari ini Jum'at, 07 Mei 2021 telah diselenggarakan seminar Proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan menerangkan bahwa :

Nama : Ade Shandra Pratiwi
N.P.M. : 1705180030
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 02 Agustus 1999
Alamat Rumah : Jl Panglima Denai No. 12 Medan
Judul Proposal : Perkembangan Kemiskinan Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Provinsi Penerima Dana Otsus di Indonesia
(studi kasus: Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh)

Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul	Perkembangan kemiskinan pasca Desentralisasi fiskal pada provinsi penerima Dana otsus di Indonesia (studi kasus = Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh).
Bab I	- Penambahan latar belakang dan objek penelitian.
Bab II	Kerangka konseptual harus dipertbaiki
Bab III	Pertibalkan def. operasional dan model estimasi
Lainnya	—
Kesimpulan	<input checked="" type="checkbox"/> Lulus <input type="checkbox"/> Tidak Lulus

Medan, Jum'at, 07 Mei 2021

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.Lailan Safina Hasibuan, M.Si

Pembanding

Dr.Prawidya Hariani RS, SE.,M.Si.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Ekonomi Pembangunan yang diselenggarakan pada hari *Jum'at, 07 Mei 2021* menerangkan bahwa:

Nama : Ade Shandra Pratiwi
N.P.M. : 1705180030
Tempat / Tgl.Lahir : Medan, 02 Agustus 1999
Alamat Rumah : Jl Panglima Denai No. 12 Medan
Judul Proposal : Perkembangan Kemiskinan Pasca Kebijakan Desentralisasi Fiskal Pada Provinsi Penerima Dana Otsus di Indonesia (studi kasus: Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh)

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : *Dra.Hj.Lailan Safina Hasibuan, M.Si*

Medan, Ade Shandra Pratiwi

TIM SEMINAR

Ketua

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Sekretaris

Dra.Hj.Roswita Hafni, M.Si.

Pembimbing

Dra.Hj.Lailan Safina Hasibuan, M.Si

Pemanding

Dr.Prawidya Hariani RS,SE.,M.Si.

Diketahui / Disetujui
A.n. Dekan
Wakil Dekan - I

Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ADE SHANDRA PRATIWI
N.P.M : 1705180030
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : Jl. SESER 3 NO.12 MEDAN
Judul Skripsi : PERKEMBANGAN KEMISKINAN PASCA KEBIJAKAN
DESENTRALISASI FISKAL PADA PROVINSI PENERIMA
DANA OTSUS DI INDONESIA (STUDI KASUS PROVINSI
PAPUA BARAT DAN ACEH)

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
01-07-2021	- Diskusi ttg isi bab II	he	
14-08-2021	- Perbaiki penulisan bab IV sesuai dengan koreksi - Haki ² penomoran sub IV	he	
25-08-2021	- Perbaiki hasil dan pembahasan - Jelaskan analisis hasil estimasi yg - Perbaiki koreksi yg ada.	he	
31-08-2021	- Lengkapi abstrak. - Lengkapi daftar pustaka - Perbaiki lagi penulisan	he	
03-09-2021	Telah selesai diperiksa dan revisi untuk diproses lebih lanjut	he	

Medan, September 2021
Diketahui /Disetujui
Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan

Pembimbing Skripsi

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si